

KOALISI DAN KONFLIK INTERNAL PARTAI POLITIK PADA ERA REFORMASI

Coalition and Internal Party Conflicts of Reform Era in Indonesia

Lili Romli

Peneliti Utama Pusat Penelitian Politik LIPI dan
Staf Pengajar Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia
Alamat email: liliromli.lipi@gmail.com

Naskah Diterima: 14 Agustus 2017
Naskah Direvisi: 20 November 2017
Naskah Disetujui: 20 November 2017

Abstract

In this era of reform, political parties have internal conflicts. Factors causing the internal conflict, among others, are caused by coalition and opposition choices. The political parties involved in internal conflicts, some sparked divisions that led to the birth of new parties and some gave birth to double stewardship. Often organized internal conflicts of these political parties look very weak cohesiveness in the bodies of political parties. Internal conflicts in political parties also indicate how minimal institutionalization in the party body is in resolving conflicts to reach consensus. The tendency of internal conflict is not caused by differences in vision, mission and platform, and ideological party but by pragmatism on the choice of coalition of political parties in support of the presidential candidate and vice president and / or government and as well as the interests of power.

Keywords: political party, factionalism, internal party conflicts, political coalition, presidential election

Abstrak

Pada era reformasi ini, partai politik mengalami konflik internal. Faktor yang menyebabkan konflik internal tersebut, antara lain, disebabkan oleh pilihan koalisi dan oposisi. Kecenderungan yang muncul, partai-partai politik terlibat dalam konflik internal, sebagian memunculkan perpecahan yang berujung pada lahirnya partai-partai baru dan sebagian lagi melahirkan kepengurusan ganda. Kerap munculnya konflik internal partai-partai politik tersebut memperlihatkan betapa lemahnya kohesivitas di tubuh partai-partai politik. Konflik internal pada partai-partai politik juga menandakan betapa minimnya pelembagaan di tubuh partai dalam mengatasi konflik untuk menuju konsensus. Kecenderungan konflik internal bukan disebabkan perbedaan visi-misi, platform dan ideologi partai, tetapi cenderung disebabkan oleh pragmatisme atas pilihan koalisi partai politik dalam mendukung calon presiden dan wakil presiden dan/atau pemerintahan serta kepentingan kekuasaan.

Kata Kunci: partai politik, faksionalisme, konflik internal partai, koalisi politik, pemilihan presiden

PENDAHULUAN

Partai-partai politik era reformasi kerap mengalami konflik internal yang berujung pada perpecahan dan menghasilkan kepengurusan ganda. Kehadiran Partai Gerindra, Partai Nasdem, dan Partai Hanura, misalnya, adalah produk dari konflik internal Partai Golkar.

Begitu juga dengan berdirinya Partai Bintang Reformasi (PRB) merupakan akibat dari konflik internal dalam tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sedangkan Konflik internal yang terjadi di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melahirkan Partai Kejayaan Demokrasi (PEKADE) Pimpinan Matori Abdul Djalil dan Partai Kemakmuran Bangsa

Nusantara (PKBN) Pimpinan Zarnuba Arifah Chafsoh (Yeni Wahid).¹

Pasca Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, konflik internal yang bermuara pada terbentuknya kepengurusan ganda muncul di Partai Golkar dan PPP. Keberadaan kepengurusan ganda pada Partai Golkar dan PPP, antara lain, disebabkan pengurus kedua partai tersebut berbeda dalam mendukung koalisi pemerintahan JK-Jokowi. Konflik di Golkar antara kubu Aburizal Bakri, yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) *versus* kubu Agung Laksono, yang mendukung Koalisi Indonesia Hebat (KIH) pada Pemilihan Presiden 2014. Begitu juga dengan konflik internal di PPP, antara kubu Djan Faridz atau Suryadarma Ali yang mendukung KMP *versus* Romahurmuziy yang tergabung dalam KIH.

Kecenderungan konflik internal partai-partai politik tersebut disebabkan oleh kepentingan politik elit-elit partai dalam memilih koalisi mengusung calon peresiden-wakil presiden dan/atau bergabung serta tetap dengan pemerintah yang berkuasa. Sehubungan dengan itu, pertanyaan adalah: mengapa pilihan koalisi dalam pemilihan presiden 2014 terjadi konflik internal partai? Apa yang menjadi faktor penyebab dari konflik internal partai tersebut? Ada pun tujuan dari tulisan ini adalah menjelaskan tentang faktor pilihan koalisi dan kepentingan kekuasaan dalam konflik internal partai politik di Indonesia era reformasi.

TEORI KONFLIK DAN KOALISI

Konflik merupakan suatu yang inheren dalam setiap masyarakat atau suatu organisasi. Tidak ada satu masyarakat atau organisasi pun yang bisa lepas dari konflik. Konflik yang terjadi dalam masyarakat tersebut bisa dalam bentuk kekerasan maupun non-kekerasan. Konflik dalam bentuk kekerasan adalah konflik yang saling melukai atau saling menghancurkan satu sama lain di antara pihak-pihak yang terlibat di

dalamnya. Sedangkan konflik non-kekerasan adalah konflik karena perbedaan pendapat dan/atau gagasan. Dalam alam demokrasi, perbedaan pandangan atau pendapat merupakan bagian dari dinamika demokrasi itu sendiri.

Persoalannya adalah bagaimana agar konflik yang terjadi tersebut tidak sampai menghancurkan sistem kemasyarakatan (disintegrasi sosial) atau merusak kohesivitas (keutuhan) organisasi. Artinya, konflik tidak bersifat destruktif, tetapi konstruktif. Ini merupakan tantangan yang harus bisa dijawab dan diatasi agar konflik (perbedaan pendapat) yang terjadi memberikan energi bagi perkembangan dan kemajuan suatu organisasi. Namun sayangnya, bila kita merujuk pada partai politik di Indonesia untuk melaksanakan fungsi tersebut terlihat belum maksimal. Alih-alih partai politik sebagai *agent of conflict management*, gambaran yang kerap muncul: partai-partai politik dilanda konflik internal sehingga abai melaksanakan fungsinya sebagai penyelesai konflik.²

Secara sederhana, makna konflik adalah karena adanya perbedaan-perbedaan kepentingan antara individu yang satu dengan individu yang lain atau kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Di antara perbedaan kepentingan itu adalah perbedaan kepentingan politik, sehingga disebut juga sebagai konflik politik. Ada tiga macam konflik politik. Pertama, konflik politik karena memperebutkan jabatan-jabatan politik atau kekuasaan. Kedua, konflik politik karena kebijakan-kebijakan politik. Ketiga, konflik politik muncul karena perbedaan pandangan terhadap lembaga-lembaga politik.³

Motif seseorang untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan, menurut penjelasan Maurice Duverger, bisa didasarkan oleh motif ekonomi dan motif altruistik. Duverger mengemukakan bahwa ada dua doktrin terkait

¹ Terkait dengan konflik internal partai yang berujung pada perpecahan ini, lihat penjelasan Bestian Nainggolan, "Konsentrasi dan Dekonsentrasi Kuasa", dalam Litbang Kompas, *Partai Politik Indonesia 1999-2019, Konsentrasi dan Dekonsentrasi Kuasa*, Jakarta; Penerbit Kompas, 2016.

² Lihat Lili Romli, "Reformasi Partai Politik dan Sistem Kepartain di Indonesia", *Jurnal Politica*, Vol. 2 No.2. November 2014.

³ Lihat Maswadi Rauf, *Konsensus dan Konflik Politik: Sebuah Penajagan Teoritis*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2000.

perjuangan untuk kepentingan politik. Pertama, doktrin liberal yang mengatakan bahwa motif perjuangan kepentingan politik ekuivalen dengan doktrin borjuis dari teori Charles Darwin tentang “*struggle for life*”. Atas dasar itu di dalam arena politik maka perjuangan itu menjadi “perjuangan untuk posisi utama” dalam jabatan politik. Terkait dengan ini maka persaingan memperebutkan posisi politik tersebut didasarkan pada motif-motif ekonomi dan keinginan-keinginan sendiri. Ini berbeda dengan doktrin kedua, yaitu pandangan kalangan konservatif bahwa motif perjuangan untuk politik didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan altruistik. Mereka yang berjuang untuk kekuasaan sesungguhnya didorong untuk mengabdikan diri bagi pelayanan masyarakat, suatu bentuk pengorbanan bagi kepentingan umum.⁴

Apa yang dikemukakan Duverger tersebut senada dengan pandangan Max Weber, meski dengan bahasa yang berbeda. Weber menyatakan bahwa orang yang terlibat di dalam politik, terbagi atas dua tipe, yang pertama, karena faktor panggilan hidup (*calling*), di mana ia memasuki dunia politik sebagai bentuk pengabdian. Kedua, mereka memasuki dunia politik karena faktor mencari pekerjaan dan penghidupan. Jika faktor pertama yang dikedepankan maka politik sebagai ranah perjuangan untuk mewujudkan nilai-nilai idealisme, sedangkan faktor kedua dunia politik dipenuhi oleh pragmatisme dan oportunisme. Jika merujuk pada pendapat Duverger dan Weber tersebut, konflik internal yang terjadi pada partai-partai politik era reformasi ini disebabkan karena mereka memiliki motif hanya untuk kekuasaan dan bukan karena panggilan hidup ketika mereka berkecimpung dalam politik.

Konflik internal partai politik bukan hanya karena perebutan kekuasaan tetapi juga karena faktor faksionalisme. Zariaski mengartikan faksi sebagai kelompok intra-partai, dimana anggotanya memiliki identitas dan tujuan yang sama, dan bekerja sama untuk mencapai

tujuan tersebut. Tujuan faksi sangat beragam, termasuk: mempertahankan patronase dan kontrol faksi atas partai, mempengaruhi strategi dan kebijakan partai, serta mengusulkan serangkaian nilai baru kepada partai. Selanjutnya ia mengatakan ada dua elemen penting dari faksi, yakni: (1) sub-kelompok yang menjadi bagian dari kelompok yang lebih besar, dan (2) sub-kelompok dipersatukan oleh identitas dan tujuan yang sama⁵

Sementara Ian McAllister mengatakan bahwa faksi sebagai kekuatan-kekuatan yang bersaing untuk mendapatkan pengaruh dari institusi-institusi penting di dalam kepengurusan partai mengenai perumusan kebijakan partai dan penentuan kandidat untuk mengisi jabatan politik di partai maupun pemerintahan.⁶ Sebagai sebuah faksi politik, kelompok tersebut bersaing dengan lawan-lawannya untuk memperoleh keuntungan kekuasaan di dalam kelompok yang lebih luas, di mana mereka menjadi bagian di dalamnya. Sehubungan dengan itu David Hine berpendapat bahwa faksi akan menjadi faktor konflik internal partai manakala ikatan antar faksi partai lebih dipengaruhi oleh kepentingan individu/kelompok dibandingkan oleh adanya kesamaan gagasan.⁷ Faksi di dalam partai politik dapat mencerminkan berbagai kombinasi motif yang berbeda, seperti perbedaan ideologi atau isu, perbedaan sosial dan budaya, dan pertarungan kepemimpinan pribadi. Meskipun biasanya istilah ini dianggap sebagai kebalikan dari istilah kohesi, kita melihat bahwa faksionalisme di dalam partai sebagai sesuatu yang konstruktif.

Konflik internal partai politik bisa terjadi disebabkan oleh faktor pilihan koalisi. Koalisi, yang merupakan kesepakatan atau aliansi di antara partai-partai politik untuk tujuan dan membangun pemerintahan bersama, tidak akan

⁴ Maurice Duverger, *Sosiologi Politik*, Jakarta: Rajawali Pers, 1981, 174-175.

⁵ Raphael Zariski, “Party Factions and Comparative Politics: Some Preliminary Observations,” *Midwest Journal of Political Science*, Vol. 4, No. 1 (1960): 33.

⁶ Ian McAllister, “Party Adaptation and Factionalism in within the Australian Party System,” *American Journal of Political Science*, Vol. 35, No. 1 (Februari 1991): 208.

⁷ David Hine, “Factionalism in West European Parties: A Framework for Analysis,” *West European Politics*, Vol. 5, No. 1 (2013): 41.

terjadi konflik di antara partai-partai politik. Namun untuk kasus Indonesia, konflik internal partai politik terjadi justru akibat pilihan koalisi. Bisa jadi konflik internal tersebut muncul karena pilihan koalisi tersebut bukan didasarkan oleh kesamaan ideologi atau platform partai tetapi karena kepentingan jangka pendek.

Dalam ilmu politik, secara garis besar koalisi dikelompokkan atas dua kelompok. Pertama, *policy blind coalition*, yaitu koalisi yang tidak didasarkan atas pertimbangan kebijakan, tetapi untuk memaksimalkan kekuasaan (*office seeking*). Kedua, *policy-based coalitions*, yaitu koalisi berdasarkan pada preferensi tujuan kebijakan yang hendak direalisasikan (*policy seeking*).⁸ Kriteria dari masing-masing bentuk koalisi tersebut dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini.

KOALISI PEMERINTAHAN ERA REFORMASI

Koalisi pemerintahan di Indonesia bukanlah hal baru. Semenjak Indonesia merdeka, yang disebutnya era Demokrasi Parlementer, pemerintahan atau kabinet selalu dibangun atas dasar koalisi.⁹ Koalisi pemerintahan dijalankan juga saat bentuk pemerintahan tidak lagi parlementer tetapi sistem presidensial. Pada masa Demokrasi Terpimpin, di bawah rezim Soekarno, kabinet yang dibentuk mengikutsertakan partai-partai politik pendukungnya yang tergabung dalam poros NASAKOM (Nasionalis, Agama, dan Komunis). Begitu juga pada masa awal era Orde Baru di bawah rezim Soeharto, kabinet

Tabel 1. Model Koalisi

| <i>Policy Blind Coalitions Theory</i> | <i>Policy Based Coalitions Theory</i> |
|---|---|
| Menekankan prinsip ukuran atau jumlah kursi | Menekankan kesamaan dalam preferensi kebijakan |
| <i>Minimal winning coalitions</i> (William Riker) | <i>Minimal connected coalitions</i> (Rober Axelrod) |
| Asumsi partai bertujuan " <i>office seeking</i> " (memaksimalkan kekuasaan) | Asumsi partai bertujuan " <i>policy seeking</i> " (mewujudkan kebijakan sesuai kepentingan partai) |
| Loyalitas peserta koalisi sulit dijamin | Loyalitas peserta koalisi secara minimal diikat oleh kesamaan tujuan kebijakan |
| Sulit diprediksi, juga range ukuran jumlah partai sangat beragam | Koalisi bisa sangat gemuk dengan melibatkan partai-partai yang tidak perlu agar tujuan kebijakan mendapat dukungan mayoritas. |

Sumber: Sri Budi Eko Wardani, "Koalisi Partai Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung: Kasus Pilkada Provinsi Banten Tahun 2006", Tesis, (Jakarta: Program Pasca sarjana Ilmu Politik FISIP UI, 2007).

Konflik internal partai politik di Indonesia terjadi yang disebabkan oleh faktor koalisi karena koalisi yang dibangun berdasarkan *office seeking*. Dengan model koalisi seperti ini maka perilaku partai dalam membangun koalisi lebih didasarkan pada kehendak untuk memperbesar peluang dalam memperoleh posisi di kabinet atau pemerintahan yang akan terbentuk. Koalisi yang terbentuk atas dasar *office seeking* akan rapuh karena berdasarkan pertimbangan pragmatis-jangka pendek.

pertama yang dibentuk, yang disebutnya sebagai Kabinet Ampera II dan Kabinet Pembangunan I, mengajak juga partai-partai politik lainnya, selain Golkar sebagai partai penguasa, dalam menyusun kabinet.¹⁰

⁸ Lihat, Sri Budi Eko Wardani, "Koalisi Partai Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung: Kasus Pilkada Provinsi Banten Tahun 2006", Tesis, Jakarta: Program Pascasarjana Ilmu Politik FISIP UI, 2007.

⁹ Herbert Feith, "The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia, Ithaca and London", (Cornell University Press, 1973).

¹⁰ Pada Kabinet Ampera II, menteri yang berasal dari partai, antara lain, Idham Chalid (NU, sebagai Menteri Negara Kesejahteraan Rakyat dan Sanusi Dardjadinata (PNI) sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Sedangkan pada Kabinet Pembangunan I, menteri yang berasal dari partai antara lain Menteri H. MS Mintaredja, SH dari Parmusi diangkat sebagai Menteri Negara Bidang PenyelenggaraanhukumpemerintahdenganMPR/DPRGR dan DPA dan H. Harsono Tjokroaminoto (Parmusi)

Pada era reformasi, kecenderungan koalisi partai dalam menyusun kabinet muncul kembali. Pasca Pemilu 1999, dilaksanakan Sidang Umum (SU) MPR 1999 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Ada dua calon Presiden yang bersaing, yaitu Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP, dan KH. Abdurahman Wahid, tokoh pendiri PKB. Dalam upaya memenangkan Abdurahman Wahid, dibentuk koalisi Poros Tengah.¹¹ Pencalonan Abdurahman Wahid oleh Poros Tengah itu menuai hasil, Abdurahman Wahid (kerap dipanggil Gus Dur) terpilih sebagai Presiden dengan memperoleh 375 suara, mengalahkan Megawati yang mendapat 313 suara. Kemenangan Abdurahman Wahid dalam pemilihan ini berkat koalisi yang dibangun koalisi Poros Tengah yang mendapat dukungan dari Golkar, Utusan Daerah, Utusan Golongan, dan TNI/POLRI.¹²

Bila kita cermati, koalisi poros tengah dan para pendukungnya tersebut cenderung berorientasi jangka pendek dan pragmatis. Koalisi ini terbentuk bukan direncanakan sejak awal, tetapi sebagai respons terhadap perkembangan politik yang ada saat itu: penolakan pencalonan Megawati dan Habibie. Di balik pembentukan koalisi itu tidak ada agenda yang substansial, yang penting asal bukan Megawati (ABM) atau ABH (asal bukan Habibie). Pencalonan Abdurahman Wahid sendiri juga bukan karena

sebagai Menteri Negara Bidang Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara. Tetapi dalam membentuk kabinet-kabinet selanjutnya, yang disebutnya sebagai Kabinet Pembangunan II sampai dengan Kabinet Pembangunan VI, Soeharto tidak lagi mengajak partai politik, hanya dari Golkar yang mengisi menteri-menteri pada kabinet dimaksud dan dari kalangan TNI serta Teknokrat/Profesional.

¹¹ Koalisi Poros Tengah beranggotakan PAN (34 kursi), PPP (58 Kursi), PBB (13 kursi), PK (7 kursi), dan partai-partai Islam "gurem" lainnya (5 Kursi). Koalisi poros tengah merupakan koalisi longgar, yang keanggotaannya tidak bersifat formal dan organisatoris, kecuali sekedar sebagai forum bagi berbagai kesepakatan lisan yang di ambil dalam pertemuan-pertemuan untuk mengantisipasi perkembangan politik khususnya persaingan dua kubu calon presiden Megawati dan Habibie.

¹² Syamsuddin Haris, *"Konflik Presiden-DPR dan Dilema Transisi Demokrasi di Indonesia"*, (Jakarta: Grafiti Pers, 2007), 78.

pertimbangan substansial untuk membangun *platform* bersama, selain karena alasan di atas (ABM atau ABH) juga karena Abdurahman Wahid dipandang sebagai sosok "jalan tengah" untuk memecah kebekuan di antar Megawati dan Habibie.¹³

Koalisi longgar dan pragmatis itu berlanjut dalam pembentukan Kabinet Persatuan Nasional. Dalam pembentukan kabinet terjadi kompromi politik antara pimpinan partai-partai politik pendukung Abdurahman Wahid (Amien Rais, Ketua Umum PAN, Akbar Tanjung, Ketua Umum Golkar, dan Hamzah Haz, Ketua Umum PPP), Wapres Megawati yang juga Ketua Umum PDIP, dan Jenderal Wiranto selaku wakil dari militer. Kompromi politik ini menghasilkan komposisi kabinet yang sebagian besar diisi oleh wakil-wakil partai politik dan militer. Dari 34 orang anggota kabinet, 23 orang merupakan wakil partai dan militer, yaitu Golkar (4 menteri), PAN (4 menteri), PDIP (3 menteri), PKB (3 menteri), PPP (2 menteri), PBB (1 menteri), PK (1 menteri), dan TNI (5 menteri).

Pada perkembangan kemudian terjadi perpecahan antara Abdurahman Wahid dengan para pendukung koalisi. Bermula dari reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Abdurahman Wahid, seperti pemberhentian Hamzah Haz selaku Menko Kesra dan Taksin, Menteri Perindustrian dan Perdagangan Yusuf Kalla, dan Menag BUMN Laksamana Sukardi. Puncak dari perpecahan adalah pemberhentian Abdurahman Wahid sebagai Presiden dan digantikan oleh Megawati Soekarnoputri.¹⁴ Pada era Megawati ini, yang disebut sebagai Kabinet Gotong Royong, sesuai dengan namanya kabinet diisi sebagian dari partai-

¹³ Haris, *"Konflik Presiden-DPR dan Dilema Transisi Demokrasi di Indonesia"*, 78.

¹⁴ Memang faktor kejatuhan Presiden Abdurahman tidak tunggal, banyak faktor yang memengaruhi, seperti kasus Bulog dan dana sumbangan Sultan Brunei, pemberhentian Jenderal (Pol) S. Bimantoro, yang digantikan oleh Komjen Chaeruddin Ismail. Akumulasi dari semua itu berujung pada Memorendum I dan UU oleh DPR, yang tidak diindahkan oleh Abdurahman Wahid, sehingga kemudian MPR mengadakan Sidang Istimewa untuk pencopotan Abdurahman Wahid.

partai politik, yaitu PDIP, Golkar, PPP, PAN, PK dan PBB.

Dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2004 secara langsung, dalam mengusung calon presiden dan wakil presiden terbangun koalisi di antara partai-partai politik. Koalisi ini niscaya dilakukan bukan hanya karena tidak ada kekuatan politik yang dominan di DPR, tetapi juga regulasi UUD 1945 hasil amandemen ada “anjuran” untuk koalisi dengan sebutan “gabungan partai politik” dalam pencalonan presiden dan wakil presiden. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 mengatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan itu lalu diterjemahkan melalui UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden Langsung. Pada Pasal 5 ayat (1) UU No. 23/2003 menyebutkan bahwa,

“Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pasangan Calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum. Selanjutnya Pasal 101 menyatakan, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat diajukan oleh Partai politik yang memperoleh kursi di DPRD sebanyak 3% atau yang memperoleh 5% suara sah secara nasional dalam pemilu legislatif”.

Berdasarkan hasil pemilu legislatif 2004, dari 24 partai politik yang berhak mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah 7 partai politik, yaitu Partai Golkar, PDIP, PKB, PPP, PD, PKS, dan PAN. Dari 7 partai ini, ternyata yang mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya 5 partai politik, 2 yang lainnya tidak mencalonkan yakni PKB dan PKS. Sebenarnya PKB mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, tetapi kemudian calonnya ditolak oleh KPU dengan alasan tidak memenuhi persyaratan sehat jasmani dan rohani, sedangkan PKS berdasarkan keputusan Majelis Syuro-nya memtusukan tidak mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Kelima partai politik yang mengajukan calon presiden itu, hanya PPP yang mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Hamzah Haz dan Letjen (Purn) Agum Gumelar, yang tidak mendapat dukungan partai lainnya. Sedangkan empat partai lainnya mendapat dan atau berkoalisi dengan partai-partai lainnya. Partai Golkar dengan mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden Wiranto dan Solahudin Wahid mendapat dukungan dari PKB, PKPB, PDKB, Partai Patriot Pancasila, dan PPNUI. PAN yang mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Amien Rais dan Siswono Yudo Husodo didukung oleh PKS dan tujuh partai kecil yaitu PSI, PBR, PNI Marhaenisme, PPDI, PNBK, PBSB, dan PSI. PDIP yang mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden Megawati dan KH. Hasyim Muzadi didukung oleh PDS. PD yang mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dan M Jusuf Kalla didukung oleh PBB dan PKPI.

Berdasarkan hasil Pilpres 2004 putaran pertama, dari lima pasang calon tidak ada pasangan yang meraih suara 50% lebih sehingga berlanjut pada putaran kedua. Ini mengacu pada UU No.23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bahwa calon akan ditetapkan sebagai pemenang manakala meraih suara lebih dari 50 persen, jika tidak ada maka akan dilaksanakan pemilihan putaran kedua dengan mengambil dua pasang calon.¹⁵ Dari lima pasang calon pada putaran pertama, dua pasang calon yang meraih suara

¹⁵ Pasal 66 ayat (2) UU menyatakan, “Pasangan Calon yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia diumumkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan dibuatkan Berita Acara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”. Selanjutnya Pasal 67 ayat (1) mengatakan, “Dalam hal tidak ada Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), dua Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”. Lihat UU No.23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

unggul adalah pasangan SBY-JK unggul dengan 33,58 persen suara atau meraup 36.070.622 dan pasangan Megawati-Hasyim dengan perolehan suara 28.186.780 atau 26,24 persen.

Dalam Pilpres putaran kedua ini, peta koalisi mengalami perubahan. Partai-partai politik yang mengusung calon yang tidak lolos pada putaran pertama berkoalisi dengan pasangan

SBY-Kalla juga mengajak PAN dan PKB bergabung dalam pembentukan kabinet, yang mereka namakan sebagai Kabinet Indonesia Bersatu. SBY juga “mengizinkan” Kalla ikut berkompetisi dalam pemilihan Ketua Umum Golkar awal 2005, dan terpilih sebagai Ketua Umum, sehingga Golkar lalu bergabung dalam pemerintahan SBY-Kalla.

Tabel 2. Kekuatan Partai Pemerintahan di DPR Hasil Pemilu 2004 dan Posisi Menteri Dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I SBY-JK

| PARTAI PENDUKUNG | KURSI DI DPR | MENTERI DI KABINET |
|------------------|--------------|--------------------|
| Golkar | 127 | 3 |
| PKB | 52 | 2 |
| PPP | 58 | 2 |
| PD | 56 | 2 |
| PKS | 45 | 3 |
| PAN | 53 | 3 |
| PBB | 11 | 1 |
| PKPI | 1 | 1 |
| Total | 404 | 17 |

Sumber: Romli, “Peta Kekuatan Politik dan Kecenderungan Koalisi”, 2009.

yang maju untuk putaran kedua. Pasangan Mega-Hasyim, yang maju pada putaran kedua, kemudian membentuk Koalisi Kebangsaan dengan Golkar, PDIP, PPP, PBR, PDS, PKPB, dan PNIM. Sedangkan pasangan SBY-Kalla mendeklarasikan koalisi dengan nama Koalisi Kerakyatan pada tanggal 26 Agustus 2004. Anggota Koalisi Kerakyatan selain PD, PBB, dan PKPI, juga bergabung PKS, PPKD, PP, dan PPKD. Hasil Pilpres putaran kedua pasangan SBY-Kalla keluar sebagai pemenang dengan meraih suara 69.266.350 (60,62%), sedang pasangan Megawati-Hasyim meraih suara 44.990.704 (39,38%).

Pasca Pilpres koalisi kebangsaan “pecah kongsi”. PPP yang pertama-tama meninggalkan koalisi. PPP menyatakan mundur dari koalisi kebangsaan dan bergabung dengan koalisi kerakyatan setelah ditawarkan posisi Ketua DPR dalam pemilihan pimpinan DPR.¹⁶ Pasangan

¹⁶ Dalam pemilihan pimpinan DPR, koalisi kerakyatan kalah dengan koalisi kebangsaan, sehingga harapan PPP menjadi Ketua DPR gagal.

Tidak seperti Pilpres 2004 yang diikuti oleh lima pasang calon, pada pilpres 2009 hanya diikuti oleh tiga pasang calon, yaitu pasangan Megawati-Prabowo, pasangan calon SBY-Boediono, dan pasangan calon Kalla-Wiranto. Pasangan Megawati-Prabowo diusung oleh koalisi PDIP dan Gerindra serta 7 partai non-parlemen yang tidak lolos *Parliamentary Threshold* (PT), yaitu Partai Merdeka, PNI Marhenisme, Partai Karya Perjuangan, Partai Kedaulatan, Partai Sarikat Indonesia, Partai Buruh, dan Partai Persatuan Naglatul Ummah Indonesia. Pasangan calon SBY-Boediono diusung oleh koalisi PD, PAN, PKS, PKB, dan PPP serta 18 partai non-parlemen yang tidak lolos PT, yaitu PBB, PBR, PDS, PKPI, PKPB, Partai Patriot, PNBKI, PPI, PPRN, PDP, PPPI, Partai Republikan, PKDI, PIS, PPIB, PPKD dan PPD. Sedangkan pasangan calon Kalla-Wiranto hanya diusung oleh Partai Golkar dan Hanura. Pada Pilpres 2009 ini, pasangan SBY-Boediono keluar sebagai pemenang dengan meraih suara

Tabel 3. Kekuatan Partai Pemerintahan di DPR Hasil Pemilu 2009 dan Posisi Menteri Dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II SBY-Boediono

| PARTAI PENDUKUNG | JUMLAH KURSI DPR | MENTERI DI KABINET |
|------------------|------------------|--------------------|
| Partai Demokrat | 148 | 6 |
| Partai Golkar | 106 | 4 |
| PKS | 57 | 4 |
| PAN | 46 | 3 |
| PPP | 38 | 2 |
| PKB | 28 | 2 |
| JUMLAH | 423 | 21 |

Sumber: Amalia, *Evaluasi Pilpres Langsung di Indonesia*, 2016.

73.874.562 (60,80%), Megawati-Prabowo meraih suara 32.548.105 (26,79%) dan JK-Wiranto mendapat suara 15.081.814 (12,41%).

Sama seperti pilpres sebelumnya, pasca Pilpres 2009 juga peta koalisi mengalami perubahan. Partai Golkar yang semula tidak mendukung pasangan SBY-Boediono, pasca pilpres berubah haluan menjadi bagian pemerintahan. Dengan demikian, para pendukung pemerintah terdiri atas: PD, PAN, PKS, PKB, PPP, dan Golkar. Partai-partai yang bergabung dalam pemerintah tersebut mendapat kursi menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, seperti tergambar pada tabel 3.

Pilpres 2014 terdapat dua pasang calon presiden dan wakil presiden. Pertama, pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo

Subijanto-Hatta Rajasa yang diusung oleh koalisi enam partai, yaitu Partai Golkar, Partai Gerindra, PKS, PAN, PPP, dan PBB (partai non-parlemen karena tidak mendapat kursi di DPR), yang menamakan sebagai Koalisi Merah Putih (KMP). Kedua, pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang calonkan oleh koalisi PDIP, PKB, Partai Nasdem, Partai Hanura, dan PKPI (partai non-parlemen) dengan sebutan sebagai koalisi Indonesia Hebat (KIH). Dalam menghadapi kompetisi pilpres ini, PD menyatakan netral tidak mendukung salah satu dari kedua pasangan tersebut. Tetapi para kadernya, khususnya yang ada di parlemen, menyatakan mendukung pasangan yang diusung oleh kubu KMP. Pilpres 2014 dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan meraih suara 70.997.850 (53,15%), sedangkan

Tabel 4. Kekuatan Partai Pemerintahan di DPR Hasil Pemilu 2014 dan Posisi Menteri dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK

| PARTAI PENDUKUNG | KURSI DI DPR | MENTERI DI KABINET |
|------------------|--------------|--------------------|
| PDIP | 109 | 5 |
| Partai Nasdem | 35 | 3 |
| PKB | 47 | 4 |
| Partai Hanura | 16 | 1 |
| PPP | 39 | 1 |
| PAN | 49 | 1 |
| Partai Golkar | 91 | 1 |
| PKPI | 0 | 1 |
| JUMLAH | 386 | 16 |

Sumber: Romli, "Peta kekuatan Partai Politik Hasil Pemilu 2014", 2016. Posisi kabinet diolah dari berbagai sumber.

pasangan Prabowo Subijanto hanya meraih suara 62.576.444 (46.85%).

Sama seperti sebelumnya, peta koalisi pasca pilpres terjadi juga perubahan. Partai-partai yang sebelumnya menjadi oposisi, pada perkembangan kemudian bergabung dengan partai pemerintah. Mula-mula partai yang bergabung dengan pemerintah adalah PPP, selanjutnya di susul oleh PAN dan Partai Golkar, sehingga konfigurasi kekuatan menjadi berubah. Partai oposisi tinggal Gerindra dan PKS, sedangkan partai pendukung pemerintah: PDIP, NASDEM, PKB, Hanura, PPP, PAN dan Partai Golkar. Para partai pendukung pemerintah ini mendapat jatah kursi di kabinet seperti pada tabel 4.

Bila kita mencermati koalisi yang terbentuk pada era reformasi tersebut cenderung bersifat *office seeking*, bukan berdasarkan kesamaan program atau platform dari masing-masing partai dalam membangun koalisi. Hal itu terlihat dengan kasat mata bahwa partai-partai yang tergabung dalam koalisi adalah untuk mencari posisi jabatan dalam pemerintahan dan bisa jadi juga terkait keuntungan finansial. Dengan kata lain, koalisi yang dipraktikkan oleh partai-partai politik kita dewasa ini cenderung bersifat *instant* karena lebih berdasarkan kepentingan politik jangka pendek dan belum berdasarkan *platform* dan program politik yang disepakati bersama.

Mestinya koalisi yang dibangun oleh partai-partai politik bersifat permanen dan menekankan kesamaan dalam preferensi kebijakan, bertujuan *policy seeking* (mewujudkan kebijakan sesuai kepentingan partai), yang diikat oleh kesamaan tujuan dan kebijakan. Koalisi yang diperlukan adalah koalisi berbasis kesamaan ideologi dan atau platform politik di antara partai-partai yang berkoalisi. Melalui format koalisi semacam ini diharapkan bahwa dukungan ataupun penolakan terhadap suatu kebijakan berorientasi kepentingan kolektif, bukan kepentingan jangka pendek partai-partai di parlemen. Koalisi berbasis platform diperlukan agar relasi Presiden-DPR tidak semata-mata menjadi arena transaksi politik antarelite pemerintah dan politisi partai-partai.

PILIHAN KOALISI DAN KONFLIK INTERNAL PARTAI POLITIK

Salah satu faktor yang menyebabkan konflik internal di dalam partai-partai politik pada era reformasi disebabkan oleh pilihan koalisi dari partai-partai politik dalam mendukung calon persiden dan/atau pemerintahan. Di internal partai-partai politik, ternyata dalam memberikan dukungan atau bergabung dalam koalisi dan/atau mendukung pemerintah atau beroposisi tersebut, memunculkan perpecahan dan faksionalisme.

Kasus pertama konflik internal partai politik terkait dengan ini adalah PKB, pada era Pemerintahan Abdurahman Wahid (Gus Dur). Seperti diketahui, Gus Dur terpilih menjadi Presiden diusung oleh Koalisi Poros Tengah. Dalam perjalanan kemudian, koalisi Poros Tengah pula yang menggagas untuk “menjatuhkan” Gus Dur dari kursi Presiden. Dalam konteks konflik internal PKB, Matori Abdul Djalil, sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz PKB, justru setuju untuk melengserkan Gus Dur sebagai Presiden. Padahal Gus Dur, sebagai Ketua Umum Dewan Syuro PKB, membekukan seluruh kegiatan Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) di DPR dan MPR, dan melarang hadir dalam Sidang Istimewa (SI) MPR. Larangan tersebut dilanggar oleh Matori, karena ia tetap hadir dalam SIMPR tanggal 23 Juli 2001. Matori lalu diberhentikan sebagai Ketua Umum DPP PKB oleh Gus Dur dan menunjuk Alwi Shihab sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Ketua Umum DPP PKB.¹⁷

Konflik antara Gus Dur dan Matori berujung pada kepengurusan ganda: PKB Batu Tulis di bawah kepemimpinan Matori dengan Ketua Dewan Syuro KH. Dimiyati Rois dan PKB Kuningan yang dipimpin oleh Alwi Shihab dengan Ketua Dewan Syuro Gus Dur. Dalam perkembangan kemudian, setelah dipecat dari keanggotaan PKB, Matori bersama Abdul

¹⁷ Kamarudin, “Konflik Internal Partai Kebangkitan Bangsa (Studi Kasus Tahun 2004-2007)”, *Disertasi*, Program Pascasarjana Ilmu Politik FISIP UI, (2007). Lihat juga Firman Noor, *Perpecahan dan Soliditas Partai Islam di Indonesia: Kasus PKB dan PKS Dekade Awal Reformasi*, (Jakarta; LIPI Pers, 2015).

Kholik Ahmad dan Agus Suflihat membentuk partai sendiri dengan nama Partai Kebangkitan Demokrasi (PEKADE). Sedangkan kubu Gus Dur sendiri dalam Musyawarah Luar Biasa (MLB) memilih Alwi Shihab dan Saifullah Yusuf sebagai Ketua Umum DPP PKB dan Sekretaris Jenderal DPP PKB.

Latar belakang konflik antara Gus Dur dengan Matori ini terkait dengan kepentingan atau pilihan politik dari masing-masing kubu. Gus Dur selaku Ketua Dewan Syuro yang juga sebagai Presiden yang terancam kekuasaannya dengan dilaksanakan SI MPR, melarang Matori untuk hadir dan ikut memimpin SIMPR. Namun bagi Matori, bisa jadi selain karena alasan sebagai Wakil Ketua MPR, kehadiran dalam SI MPR adalah tugas konstitusional. Tetapi di balik itu tersirat kepentingan kekuasaan. Pasca SI MPR dengan memberhentikan Gus Dur selaku Presiden dan mengangkat Wakil Presiden Megawati sebagai Presiden, posisi Matori dalam kabinet diangkat sebagai Menteri Pertahanan.

Konflik selanjutnya diakibatkan oleh pilihan koalisi atau kepentingan politik di tubuh PKB ini terjadi antara kubu Gus Dur-Muhaimin Iskandar dengan kelompok Alwi Shihab-Syaifullah Yusuf. Konflik ini disebabkan oleh penonaktifan Alwi Shihab dan Saifullah Yusuf dari posisi Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dengan alasan masuk dalam kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.¹⁸ Dampak konflik ini melahirkan kepengurusan ganda: Pertama, kepengurusan hasil Muktamar II PKB di Semarang, 16-18 April 2005, yang memilih Gus Dur sebagai Ketua Umum Dewan Syuro dan Muhaimin Iskandar selaku Ketua Umum DPP PKB serta Lukman Edy sebagai Sekjen DPP PKB. Kedua, hasil Muktamar PKB di Surabaya, 1-2 Oktober 2005, yang memilih

¹⁸ Alwi Sihab diangkat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Syaifullah Yusuf sebagai Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal. Akibat konflik ini, Presiden SBY kemudian mengganti Alwi Sihab dengan Erman Suparno, tetapi dengan posisi sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sedangkan Syaifullah Yusuf diganti oleh Lukman Edy dengan posisi sama sebagai Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal.

KH Abdurahman Chudlori sebagai Ketua Umum Dewan Syuro dan Choirul Anam-Idham Cholied sebagai Ketua Umum DPP PKB dan Sekjen DPP PKB. Hasil Muktamar di Surabaya ini didukung oleh Alwi Shihab dan Saifullah Yusuf. Dalam perkembangan kemudian, kubu Alwi Shihab membentuk partai politik baru: Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) pada 12 November 2006, dengan Ketua Dewan Syuro KH. Abdurahman Chudori dan Ketua Umum DPP PKNU Choirul Anam (Mantan Ketua DPW PKB Jawa Timur). Sementara Saiflah Yusuf tidak bergabung dalam pembentukan partai baru ini, ia hijrah ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Konflik antara Gus Dur dengan Muhaimin Iskandar, juga melahirkan kepengurusan ganda: PKB versi Muktamar Parung dengan Ketua Dewan Syuro Gus Dur dan Ketua Umum-Sekjen DPP PKB Ali Masyur Musa-Zanuba Arifah Chafsah (Yeny). Konflik ini bermula saat Gus Dur memecat Muhaimin Iskandar tahun 2008 selaku Ketua Umum DPP PKB. Melalui forum terbatas yang dihadiri oleh 30 orang, yang agenda semula pelepasan Prof. Dr. M. Mahfud M.D, yang diangkat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), berujung pada evaluasi Ketua Umum Dewan Tanfidz, dan berakhir pada pemecatan. Seperti yang ditulis oleh Firman Noor dalam bukunya,¹⁹

“Dalam rapat yang berlangsung pada 26 Maret 2008 tersebut....Gus Dur angkat bicara dan menyatakan kekecewaannya terhadap Muhaimin yang dianggapnya sudah tidak loyal dan melakukan manuver yang arogan...Muhaimin yang hadir dalam forum itu menolak tuduhan yang disampaikan padanya..... secara tegas mengatakan tidak pernah mengungkapkan pernyataan-pernyataan sebagaimana yang dituduhkan kepadanya. Muhaimin bersumpah atas nama Tuhan bahwa hal itu tidak benar”.

Evaluasi yang dilakukan oleh Gus Dur yang berujung pada pemecatan itu berdasar pada voting, dimana dari 30 yang hadir: 20 orang setuju Muhaimin mundur sebagai Ketua Umum,

¹⁹ Firman Noor, *Perpecahan dan Soloditas Partai Islam di Indonesia: Kasus PKB dan PKS Dekade Awal Reformasi* (Jakarta; LIPI Pers, 2015), 156.

lima orang menghendaki Musyawarah Luar Biasa (MLB), dan tiga orang tidak setuju MLB, dan dua orang abstain. DPP kemudian pada 5 April 2008 resmi memberhentikan Muhaimin dan mengangkat Ali Maskur Musa sebagai Pjs Ketua Dewan Tanfidz.²⁰

Konflik internal akibat pilihan koalisi juga melanda Partai Golkar. Konflik internal dalam tubuh Golkar terjadi antara faksi Jusuf Kalla (JK) dan faksi Akbar Tandjung. Konflik antar faksi dalam tubuh Golkar terekam dalam pemilihan presiden dan wakil presiden 2004. Diketahui Golkar bersama PKB, PKPB, PDKB, Partai Patriot Pancasila, dan PPNUI mengusung pasangan Wiranto-Salahuddin Wahid, sementara Jusuf Kalla (JK) memilih berduet dengan capres Partai Demokrat (PD), Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang diusung oleh PD, PBB, dan PKPI. Akibatnya para kader Golkar terbelah, ada yang mengikuti kubu Akbar Tandjung yang mengusung duet Wiranto-Salahuddin dan kubu pendukung SBY-JK, sehingga kondisi ini menciptakan perpecahan dalam tubuh Golkar.²¹

Duet Wiranto-Salahuddin gagal pada putaran pertama Pemilihan Presiden (Pilpres) 2004, yang hanya memperoleh suara 26.286.788 (22,15%), sehingga tidak bisa melaju pada putaran kedua pilpres. Menghadapi putaran kedua pilpres ini, Golkar melaksanakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada Agustus 2004, yang menghasilkan keputusan mendukung pasangan Megawati-Hasyim dalam Pilpres putaran kedua, 20 September 2004. Keputusan ini kemudian diikuti dengan pembentukan Koalisi Kebangsaan yang terdiri dari Partai Golkar, PDIP, PPP, PDS, PBR dan PNI Marhaenisme.²² Keputusan Rapimnas bergabung dengan Koalisi Kebangsaan tidak diikuti oleh sejumlah pengurus dan kader

Golkar, seperti Muladi SH, Fahmi Idris, Marzuki Darusman, Burhanuddin Napitupulu, Yuniwati Maskur Sofwan, Anton Lesiangi, Abu Hanifah, Abu Hasan Sadjili, Priyo Budi Santoso, Yuslin Nasution. Anton Lesiangi, Edison Betaubun, Yorris Raweyai, dan Malkan Amin, sebaliknya mereka mendukung pasangan SBY-JK. Pada perkembangan kemudian, para pengurus dan kader Golkar yang “mbalelo” ini dinonaktifkan dari Golkar.²³

Pasca kemenangan SBY-JK, peta politik di Golkar mengalami perubahan drastis. Kemenangan ini menjadi arus balik pendulum politik Golkar sekaligus menunjukkan pragmatismenya partai ini. Ini terlihat ketika Munas VII Partai Golkar di Bali, 16-19 Desember 2004, Jusuf Kalla (JK) tiba-tiba ikut kompetisi perebutan Ketua Umum Partai Golkar periode 2004-2009.²⁴ Meski banyak calon, sesungguhnya kompetisi perebutan calon ketua umum Golkar mengerucut pada dua kandidat: persaingan antara Akbar Tandjung (AT) dengan Jusuf Kalla (JK). Kubu Akbar didukung oleh beberapa elit DPP seperti Freddy Latumahina, Mahadi Sinambela, Mohammad Hatta, Ferry Mursidan Baldan, Ade Komarudin, Agung Gunanjar Surdarsa, Asep Sudjana dan Akil Mochtar. Sedang Kubu JK didukung oleh Surya Paloh, Agung Laksono, Aburizal Bakrie, Muladi, Sri Sultan Hemengkubuwono X, Fahmi Idris, Ginanjar Kartasmita, dan Syamsul Muarif.²⁵ Persaingan perebutan jabatan ketua umum ini oleh Akbar Tandjung sendiri dalam bukunya menyebutnya sebagai persaingan

²⁰ Firman Noor, *Perpecahan dan Soloditas*, 156-157.

²¹ “Merunut Sejarah Konflik Partai Golkar”, 13 Januari 2016, diakses 15 Januari 2017, <http://print.kompas.com/baca/opini/duduk-perkara/2016/01/13/Merunut-Sejarah-Konflik-Partai-Golkar>

²² Andi Harianto Sinulingga, *Pecah Belah Partai Golkar: Dinamika Konflik Golkar Parca Orde Baru* (Jakarta, Penjuru Ilmu, 2005), 100.

²³ “Golkar Pecat Pengurus dan Kader “Mbalelo””, diakses 15 Januari 2017, <http://www.suaramerdeka.com/harian/0409/16/nas>

²⁴ Secara keseluruhan ada tujuh calon Ketua Umum Partai Golkar dalam Munas VII, yaitu Akbar Tandjung, Wiranto, Jusuf Kalla, Surya Paloh, Agung Laksono, Slamet Effendy Yusuf, dan Marwah Daud Ibrahim. Dari tujuh nama, yang maju sebagai calon adalah Akbar Tandjung, Jusuf Kalla, dan Marwah Daud Ibrahim. Wiranto, Surya Paloh dan Agung Laksono tidak mengembalikan formulir, sedang Slamet Effendy Yusuf mundur dari pencalonan. Lihat Bahtiar Effendy, dkk, *Beringin Membangun, Sejarah Politik Partai Golkar* (Jakarta: Grafindo Khasanah Ilmu, 2012), 193.

²⁵ Bahtiar Effendy, dkk, *Beringin Membangun*, 196.

antara “kubu struktural” dan “kubu saudagar”.²⁶ Bila kita lihat dari pihak-pihak yang mendukung JK memang berlatar belakang para pengusaha, sedang pendukung kubu Akbar sebagian besar jajaran teras Partai Golkar.

Persaingan JK dengan Akbar juga persaingan antara kubu pro-pemerintah dan kubu pro-oposisi. JK ingin mengajak Golkar bergabung dengan pemerintah, sementara Akbar tetap agar Golkar menjadi partai oposisi, di luar pemerintahan. Sikap JK seperti itu gamblang karena ia sebagai Wakil Presiden yang sudah pasti mendukung dan mengajak agar Golkar bergabung dengan pemerintah. Dalam konteks ini JK mengatakan,

“Tidak ada partai yang didirikan khusus untuk melawan pemerintah, tidak. Semua partai ingin agar dia memerintah untuk mencapai cita-cita dan tujuannya, semua. JK lalu menegaskan bahwa Partai Golkar adalah pemenang Pemilu 2004 sehingga tidak layak rasanya jika kemudian beroposisi.”²⁷

Persaingan memperebutkan kepemimpinan Golkar, seperti sudah diduga, akan dimenangkan oleh JK, yang meraih suara mayoritas 323, sedangkan Akbar hanya meraih 156 suara. Dengan kemenangan ini maka JK selain sebagai Wakil Presiden, ia juga merangkap sebagai Ketua Umum. Alasan JK sebagai ketua umum, mengatakan:

“Kenapa saya menjadi Ketua Umum Partai Golkar? Pertimbangannya sederhana: tanpa suatu stabilitas politik, sulit sekali kita membuat suatu kebijakan ekonomi yang baik. Tapi ada satu hal yang sangat penting. Kultur Golkar itu kultur pembangunan atau kultur pemerintah...”²⁸

Lebih lanjut JK mengatakan, tidak setuju dengan kebijakan oposisi yang pernah digagas oleh Akbar Tandjung. Tujuan Partai Golkar, menurut JK, identik dengan tujuan negara untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur.²⁹

Keuntungan bagi Golkar, dengan bergabung sebagai bagian dari koalisi pemerintahan, posisi menteri diberikan juga kepada kader-kader Golkar, yaitu: Aburizal Bakrie sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yang kemudian bergeser menjadi Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Fahmi Indris sebagai Menteri Perindustrian, dan M. Andi Mattalatta sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Perpecahan dan konflik internal Partai Golkar muncul kembali ketika menghadapi Pilpres 2009. Berawal ketidakpuasan terhadap perolehan suara Partai Golkar yang turun drastis, dari 21,58% pada Pemilu 2004 menjadi 14,45% pada Pemilu 2009. Padahal JK sebagai Wakil Presiden harusnya memberikan dampak positif bagi suara Golkar, sebaliknya suara Golkar malah mengalami penurunan 7% lebih. Konflik internal berlanjut tatkala JK “ngotot” maju sebagai calon presiden untuk Pilpres 2009. Beberapa pengurus dan kader Golkar tidak setuju dengan pencalonan JK sebagai Calon Presiden (Capres), seperti Fadel Muhammad, Muladi, Aburizal Bakrie, Akbar Tandjung, dan Theo Sambuaga.³⁰ Sementara kubu JK, yang diketuai oleh Fahmi Idris, tetap memajukan JK. Meski ada penolakan tersebut. Rapat Pimpinan Nasional Khusus (Rapimnasus) Partai Golkar yang berlangsung di Hotel Borobudur, 23 April 2009, tetap memutuskan mengusung Ketua Umum DPP Golkar JK sebagai Capres.

Dalam Rapimnasus itu sebenarnya ada tiga opsi, seperti yang dikemukakan oleh Fahmi Idris. Ia mengatakan, “Pilihannya sebenarnya ada tiga. Pilihan yang paling diminati, khususnya oleh Ical (Aburizal Bakrie), adalah koalisi dengan pemerintah SBY-Boediono dan PD. Opsi berikutnya oposisi, yang didukung Surya Paloh. Pilihan ketiga, yang tak banyak dibahas, menempatkan pemerintah sebagai lawan latih tanding”.³¹

²⁶ Akbar Tandjung, *The Golkar Way: Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Reformasi* (Jakarta: Gramedia), 304.

²⁷ Dikutip dari Rully Chairil Azwar, *Politik Komunikasi Partai Golkar di Tiga Era* (Jakarta: Grasindo, 2009), 165.

²⁸ Bahtiar Effendy, dkk, *Beringin Membangun*, 194.

²⁹ Bahtiar Effendy, dkk, *Beringin Membangun*, 201.

³⁰ “Golkar Pecah, Suara JK Jeblok”, diakses 15 Januari 2017, <http://politik.news.viva.co.id/news/read/73690-beringin-tak-kokoh-suara-jk-jeblok>

³¹ “Fahmi Idris: Mesin Golkar Tak Bergerak Dukung JK, Saya Syok”, diakses 15 Januari 2017, <https://m.tempo.co/read/news/2009/07/20/149188094/fahmi-idris-mesin-golkar-tak-bergerak-dukung-jk-saya-syok>

Selanjutnya Fahmi mengatakan,

“Ketika JK ditetapkan sebagai calon presiden, memang muncul pro-kontra. Yang kontra mengatakan keputusan yang diambil dalam acara di Hotel Borobudur itu tidak sebagaimana yang dikehendaki peserta. Keputusan rapat itu, kata mereka, memberi JK mandat berunding dengan SBY untuk mengusulkan calon wakil presiden. Dan itu terus dipertahankan, Golkar hanya akan mengusulkan calon wakil presiden. Tapi kebetulan SBY tak mau dengan calon Golkar. Tapi teman-teman tidak percaya.”³²

Seperti diketahui JK maju menjadi capres berpasangan dengan Wiranto, yang diusung oleh koalisi Golkar dan Partai Hanura. Hasil pilpres 2009, yang keluar sebagai pemenang pasangan SBY-Boediono dengan meraih suara 60,80%, Megawati-Prabowo 26,79% sementara JK-Wiranto hanya meraih 12,41%.

Pasca pilpres 2009, Partai Golkar kemudian mengadakan Munas VIII di Pekanbaru, Riau 5-8 Oktober 2009. Dalam Munas ini terjadi persaingan dan konflik antara kubu Surya Paloh yang didukung oleh JK dan kubu Aburizal Bakri (ARB) yang didukung oleh Akbar Tanjung, sehingga Munas VIII ini dapat dikatakan persaingan antara JK-Akbar Tandjung jilid II. Dalam tulisannya, *detik.com* memaparkan,³³

“Setelah Munas di Bali lima tahun lalu, kali ini keduanya bertemu dan bertempur lagi di Munas VIII Pekanbaru, meski sama-sama tidak mencari posisi ketua umum Golkar. Namun, kedua tokoh ini tentu punya calon yang didukung. Yang paling terlihat jelas adalah Akbar Tandjung. Mantan Ketua DPR ini, tanpa tedeng aling-aling mendukung Aburizal Bakrie alias Ical.

Jika dalam Munas Bali, Akbar ingin menjadikan Golkar sebagai oposisi, di Munas Pekanbaru yang terjadi sebaliknya. Dalam Munas Pekanbaru, justru JK-lah yang menginginkan Golkar berposisi sebagai pengontrol pemerintah. Sementara Akbar memperlihatkan sinyal dukungan kepada pemerintah.

³² “Fahmi Idris: Mesin Golkar Tak Bergerak Dukung JK, Saya Syok.”

³³ “Munas Golkar Pekanbaru, Perang Akbar Vs JK Jilid II”, diakses 15 Januari 2017, <http://news.detik.com/berita/1216118/munas-golkar-pekanbaru-perang-akbar-vs-jk-jilid-ii>

Keduanya pun saling terlibat perang statemen terbuka soal pilihan sikap itu. Hal itu diperarah dengan posisi keduanya yang terlihat berbeda secara diametral. Akbar terang-terangan berada di belakang Ical, sementara JK, meskipun belum deklarasi secara terbuka, ada tanda-tanda berdiri di belakang Surya Paloh.

Salah satu indikasi posisi JK bersama Paloh adalah dalam sambutannya saat membuka Munas, satu-satunya calon yang dia sebut dalam salam penghormatan hanyalah Paloh, yang disebut sebagai ketua Dewan Penasihat Golkar. Sementara Ical sebagai anggota dewan penasihat dan calon ketua umum serta calon-calon lain tidak disebut JK.

Dalam sambutannya pun, JK secara terang-terangan mengkritik keinginan sejumlah pihak yang ingin membawa Golkar berada dibawah ‘ketiak’ pemerintah. JK pun meminta seluruh peserta Munas tidak menjadikan Golkar sebagai partai ‘murahan’ yang meminta-minta kekuasaan.

Kontan saja pernyataan JK ini membuat panas telinga kubu Ical yang di belakangnya berjajar tokoh-tokoh nasional di bawah komando Triple A (Agung Laksono, Aburizal Bakrie, dan Akbar Tandjung)”

Dalam Munas VIII Partai Golkar di Pekanbaru ini, sesungguhnya ada empat calon, yaitu Aburizal Bakrie 297 suara, Surya Paloh 240 suara, Yuddy Chrisnandi dan Hutomo Mandala Putra tidak mendapat suara. Dari perolehan suara terlihat persaingan keras dan ketat terjadi antara Aburizal Bakrie (ARB) dan Surya Paloh. Persaingan ini mirip dengan persaingan pada Munas VII di Bali, yaitu antara kubu yang pro-pemerintah, yang diwakili oleh ARB dan Kubu Surya Paloh yang menginginkan di luar pemerintah menjadi partai oposisi.³⁴ Peta kekuatan di mana Aburizal Bakrie akan mengusung Akbar Tanjung Sebagai Ketua Dewan Penasehat dan Agung Laksono sebagai Sekjen, dan akan merapat ke pemerintahan SBY-Boediono. Alasannya karena karakter Golkar itu partai kekaryaan, tidak oposisi.³⁵ Pilihan ARB berkoalisi dengan pemerintah didukung

³⁴ Bahtiar Effendy, dkk, *Beringin Membangun*, 225.

³⁵ Bahtiar Effendy, dkk, *Beringin Membangun*, 225.

oleh senior Golkar seperti BJ. Habibie, Ginanjar Kartasasmita, Agung Laksono dan Fahmi Idris. Sedangkan Surya Paloh mengusung Jusuf Kalla sebagai Ketua Dewan Penasehat dan Siswono Yudhohusodo sebagai Sekjen, serta merapat ke partai-partai yang berposisi dengan SBY-Boediono.

Hasil Munas menempatkan ARB sebagai pemenang, dengan meraih 297 suara, Surya Paloh 240 suara. Pasca Munas VIII, dengan resmi Golkar bergabung dengan pemerintahan SBY-Boediono. Harian *Kompas* melaporkan dalam tulisannya,³⁶

“Partai Golkar akhirnya secara resmi menyatakan sikapnya untuk masuk dalam koalisi yang dibangun kubu Susilo Bambang Yudhoyono dalam pemerintahan mendatang. Pernyataan sikap ini disampaikan secara langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dalam rapat perdana Partai Golkar, Kamis (15/10/2009) malam di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat.

Sikap untuk masuk dalam koalisi tersebut, kata Ical, dilakukan atas dasar kesamaan pandangan dan platform Partai Golkar dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat.”

Bergabungnya Golkar pada koalisi SBY-Boediono disambut baik oleh SBY. Seperti diberitakan oleh *Tempo*, SBY mengatakan, “Golkar sudah menyampaikan untuk menjadi bagian dari pemerintahan dan ingin menggalang kebersamaan di parlemen dan pemerintahan. Dengan demikian, Golkar menjadi bagian di koalisi”.³⁷ Keuntungan yang didapat dengan bergabung pada koalisi Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, Golkar mendapat tiga menteri yaitu Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) Agung Laksono, Menteri Perindustrian, MS Hidayat dan Menteri Perikanan dan Kelautan, Fadel Mohammad,

yang kemudian digantikan oleh Sharif Cicip Sutardjo. Saat SBY membentuk Sekretariat Bersama (Setgab), Aburizal Bakrie, diangkat oleh SBY sebagai Ketua Harian Setgab Koalisi dengan Sekretaris dijabat oleh Syarif Hasan, dari PD.³⁸

Pola konflik internal Partai Golkar berulang kembali, seperti pola-pola sebelumnya, yaitu antara kelompok pendukung pemerintah dan pendukung oposisi. Hampir sama dengan pola konflik internal tahun 2004, di mana JK maju sebagai wakil presiden mendampingi SBY. Konflik internal dan faksionalisme ini terjadi dengan aktor yang sama: JK maju sebagai calon wakil presiden (Cawapres) untuk mendampingi Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden (Capres) yang diusung oleh PDIP. Di belakang pendukung JK selain Luhut B Panjaitan, ada beberapa politikus senior Golkar seperti Fahmi Idris, Ginanjar Kartasasmita, dan Agung Laksono, yang terang-terangan menyatakan dukungannya terhadap pasangan calon Jokowi-JK.³⁹ Selain tokoh-tokoh senior tersebut, beberapa kader Golkar yang mendukung Jokowi-JK, yaitu: Priyo Budi Santoso, Agun Gunanjar, Yorris Raweyai, Zainuddin Amali, Lowrence Siburian, Leo Nababan, Agus Gumiwang Kartasasmita, Poempida Hidayatulloh dan Nusron Wahid. Dalam perkembangan kemudian, untuk nama tiga terakhir, Agus Gumiwang Kartasasmita dan Nusron Wahid diberhentikan dari keanggotaan di Golkar⁴⁰

Hasil Pilpres 2014, pasangan Jokowi-JK sebagai pemenang di bawah bendera Koalisi Indonesia Hebat (KIH), sedangkan pasangan yang diusung Golkar yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP), yaitu Prabowo-Hatta, yang tidak menang tersebut membawa dampak bagi Golkar: konflik internal. Bermula

³⁶ “Golkar secara Bulat Masuk Koalisi SBY”, diakses 15 Januari 2017, <http://nasional.kompas.com/read/2009/10/15/22215830/golkar.secara.bulat.masuk.koalisi.sby>Kamis, 15 Oktober 2009

³⁷ “Golkar Resmi Masuk Koalisi Yudhoyono”, diakses 15 Januari 2017, <http://nasional.tempo.co/read/news/2009/10/14/078202673/golkar-resmi-masuk-koalisi-yudhoyono>

³⁸ “Ical pimpin Sekretariat Gabungan partai koalisi”, diakses 15 Januari 2017, <http://www.kabarbisnis.com/read/2811545>

³⁹ “Tokoh Senior Golkar Dukung Jokowi-JK”, diakses 15 Januari 2017, <http://www.beritasatu.tv/news/tokoh-senior-golkar-dukung-jokowi-jk/>

⁴⁰ “Golkar Pecat Agung Laksono dkk”, Koran SINDO, Rabu, 3 Desember 2014.

dari hasil Musyawarah Nasional (Munas) IX Golkar di Bali November 2015, yang mengukuhkan Aburizal kembali memimpin Golkar digugat oleh para pengurus dan kader Golkar. Agung Laksono bersama sejumlah politisi Golkar membentuk presidium Penyelamat Partai Golkar. Kemudian pada Desember 2015, mengadakan Munas di Ancol, Jakarta. Dalam Munas ini Agung Laksono terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar.⁴¹ Dengan dua versi Munas tersebut otomatis terdapat kepengurusan ganda dalam Golkar. Pertama, versi hasil munas Bali dengan Ketua Umum Aburizal Bakrie dan kedua, versi Munas Ancol dengan Ketua Umum Agung Laksono. Yang menarik kedua pengurus ini memiliki sikap yang berbeda: hasil Munas Bali tetap Golkar sebagai oposisi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) bersama-sama dengan Gerindra, PKS, PAN, PPP, dan PBB. Sedangkan Munas Ancol menolak oposisi dan harus bergabung dengan pemerintah bersama Koalisi Indonesia Hebat (KIH), yaitu PDIP, PKB, Nasdem dan Hanura.

Hartarto dengan 14 suara, Mahyudin dengan dua suara, serta Priyo Budi Santoso dan Indra Bambang Utoyo dengan satu suara.⁴²

Yang menarik, semua calon ketua umum Golkar pada Munaslub tersebut cenderung mendukung dan bergabung dengan koalisi pemerintah. Dengan demikian, maka siapa pun yang terpilih sebagai ketua umum, Golkar akan menjadi bagian dari koalisi pemerintah. Cuma memang persaingan ketat terjadi antara kubu Setya Novanto yang didukung oleh Luhut B. Pandjaitan, Menko Polkam, dengan Ade Komarudin, Ketua DPR yang menggantikan Setya Novanto. Dengan konstelasi seperti itu, peluang Setya Novanto untuk menang dalam persaingan tersebut sangat besar. Oleh karena itu, bisa difahami ketika hendak dilaksanakan putaran kedua, Ade Komarudin mengundurkan diri, karena jika tetap berlanjut, peluang Ade Komarudin sangat kecil untuk menang. Seperti sudah diprediksi, pasca Munaslub, Golkar secara resmi bergabung dengan koalisi pemerintah (KIH) dan keluar dari KMP. Selanjutnya pada Reshuffle Kabinet Jilid 2, Kabinet Kerja Jokowi-

Tabel 5. Sikap Golkar Versi Munas Bali dan Munas Ancol

| SUSUNAN PENGURUS HASIL MUNAS BALI NOVEMBER 2015 | | SUSUNAN PENGURUS HASIL MUNAS ANCOL DESEMBER 2015 | |
|---|------------------|--|----------------------|
| Ketua Umum | Aburizal Bakrie | Ketua Umum | HR. Agung Laksono |
| Sekretaris Jenderal | Idrus Marham | Sekretaris Jenderal | Zainuddin Amali |
| Bendahara Umum | Bambang Soesatyo | Bendahara Umum | Sari Yulianti |
| Sikap Politik | Oposisi | Sikap Politik | Pendukung Pemerintah |

Sumber: Diolah dari berbagai sumber media massa, 2015.

Konflik internal mereda ketika tercapai kesepakatan untuk bersama-sama mengadakan Munas Luar Biasa (Munaslub) di Nusa Dua, Bali, pada 16-17 Mei 2016. Pada Munaslub ini terpilih Setya Novanto, mantan Ketua DPR RI, yang meraih suara 277, mengalahkan para pesaingnya: Ade Komarudin yang mendapat suara 173, Aziz Syamsuddin dengan 48 suara, Syahrul Yasin Limpo dengan 27 suara, Airlangga

JK, Golkar mendapat posisi satu menteri, yaitu Menteri Perindustrian yang dijabat oleh Airlangga Hartarto. Golkar sendiri, sebelum

⁴¹ Litbang Kompas, *Partai Politik Indonesia 1999-2019, Konsentrasi dan Dekonsentrasi Kuasa*, (Jakarta; Penerbit Kompas, 2016), 122.

⁴² Harus dalam pemilihan tersebut dilakukan dua putaran karena tidak ada calon yang mendapat suara mayoritas. Ketika hendak dilaksanakan putaran kedua, dengan calon Setya Novanto dan Ade Komarudin perahin suara terbanyak, tetapi kemudian Ade Komarudin mengundurkan diri, sehingga otomatis Setya ditetapkan sebagai ketua umum Golkar terpilih. Lihat, "Setya Novanto Terpilih Jadi Ketua Umum Partai Golkar", diakses 15 Januari 2017, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/16/05/17/o7aopj377-setya-novanto-terpilih-jadi-ketua-umum-partai-golkar>

secara resmi bergabung dengan pemerintah, selain JK sebagai Wapres, Luhut B. Pandjaitan sebagai Tim Sukses Jokowi-JK mendapat posisi sebagai Kepala Staf Kepresidenan, kemudian menjadi Menko Polhukam, dan terakhir sebagai Menko Maritim.

Konflik internal dalam tubuh partai politik akibat pilihan koalisi melanda juga pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Konflik internal PPP bermula dari dukungan Suryadarma Ali (SDA) terhadap pasangan Prabowo-Hatta. SDA menyatakan bahwa PPP resmi berkoalisi dengan Partai Gerindra, dengan mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden.⁴³ Kesepakatan ini ditandai pertemuan Ketua Umum Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subiantoro, dan Ketua PPP Suryadharma Ali (SDA). Pernyataan Ketua Umum PPP SDA yang mendukung Prabowo sebagai calon presiden, dianggap oleh pimpinan PPP lainnya menyalahi konstitusi partai.⁴⁴ Romahurmuziy, Sekjen PPP, sebaliknya mendukung Jokowi. Menurutnya, ke depannya PPP siap berkoalisi dengan PDI-P dalam koalisi yang disebut Koalisi Buah Semangka.⁴⁵ Dukungan untuk berkoalisi dengan PDIP disampaikan juga oleh Hamzah Haz, mantan Ketua Umum periode sebelumnya. Hamzah juga meminta kepada seluruh kader PPP untuk membahas koalisi dalam pemerintahan Jokowi-JK di Muktamar.⁴⁶

Wakil Ketua Umum PPP, Achmad Dimiyati Natakusumah, mengingatkan jajaran pengurus dan kader partainya untuk tidak mengkhianati koalisi permanen bersama Prabowo Subianto. Mereka yang nekat ingin mendukung Jokowi-JK diminta mengundurkan diri dari PPP. Dimiyati

mengatakan, PPP harus konsisten dan patuh dengan kesepakatan koalisi yang dibangun bersama kubu Prabowo.⁴⁷ Terkait latar belakang konflik internal ini secara jelas dikemukakan oleh salah satu Pengurus DPW PPP pada Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan di Yogyakarta. Ia mengatakan,

“...perpecahan muncul di Bandung saat berbicara tentang pencalonan Suryadharma Ali sebagai capres PPP. Jadi, terdapat dua faksi di PPP, yakni faksi yang ingin mencalonkan Presiden dari internal partai, dan faksi yang ingin mencalonkan presiden dari luar partai yang akhirnya menimbulkan pembelahan PPP. Dinamika perpecahan semakin berkembang dan meluas pasca pencalonan presiden oleh PPP. Titik poinnya muncul ketika Muktamar Surabaya dianggap sebagai kegiatan partai yang melanggar UU, dan Muktamar Jakarta diakui secara sah sebagai Muktamar PPP, hingga akhirnya membentuk dua kubu, yaitu Kubu Rommahurmuziy dan Kubu Djan Faridz...”⁴⁸

Pasca Pilpres 2014, sama seperti yang terjadi di Golkar, terjadi pula dualisme kepengurusan dalam PPP, yaitu PPP kubu Romahurmuziy dan kubu Suryadarma Ali, yang dikomandani oleh Djan Faridz. Kedua kubu ini saling klaim sebagai pimpinan partai yang sah. Kedua kubu ini juga menyelenggarakan muktamar PPP. Kubu pertama melaksanakan muktamar di Surabaya yang secara aklamasi memilih Romahurmuziy sebagai ketua umum PPP. Sedangkan kubu kedua menggelar Muktamar di Jakarta yang menetapkan secara aklamasi Djan Faridz sebagai Ketua Umum PPP. Kedua kepengurusan PPP ini ternyata memiliki sikap yang berbeda terhadap pemerintahan Jokowi-JK: PPP Romi mendukung pemerintahan dan versi Djan Faridz menjadi oposisi.

⁴³ “Partai Gerindra berkoalisi dengan PPP”, diakses 15 Januari 2017, http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/04/140418_koalisi_partai_islam

⁴⁴ “Konflik guncang PPP terkait koalisi”, diakses 15 Januari 2017, http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/04/140419_konflik_ppp_koalisi

⁴⁵ “Dukung Jokowi Jadi Capres, PPP Siapkan “Koalisi Buah Semangka””, diakses 15 Januari 2017, <http://nasional.kompas.com/read/2014/03/16/1308302/Dukung.Jokowi.Jadi.Capres.PPP.Siapkan.Koalisi.Buah.Semangka>.

⁴⁶ “Hamzah Haz Minta Kader PPP Dukung Jokowi-JK”, diakses 15 Januari 2017, <http://lintas7.com/hamzah-haz-minta-kader-ppp-dukung-jokowi-jk/>

⁴⁷ “PPP: Kader dan Pengurus Pendukung Jokowi-JK Silakan Mundur”, Wednesday, 30 July 2014, 19:54 WIB, diakses 15 Januari 2017, <http://www.republika.co.id/berita/pemilu/hot-politic/14/07/30/n9izue-ppp-kader-dan-pengurus-pendukung-jokowijk-silakan-mundur>

⁴⁸ Syukri, Ketua DPW PPP Yogyakarta, FGD Tim Penelitian di Yogyakarta, 12 April 2016.

Tabel 6. Dualisme Kepengurusan PPP Versi Muktamar Surabaya dan Muktamar Jakarta dan Sikap Politik

| SUSUNAN PENGURUS HASIL UKTAMAR SURABAYA OKTOBER 2014 | | SUSUNAN PENGURUS HASIL UKTAMAR JAKARTA NOVEMBER 2014 | |
|--|----------------------|--|-----------------------|
| Ketua Umum | HM. Romahurmuziy | Ketua Umum | H. Djan Faridz |
| Sekretaris Jenderal | H. Aunur Rofiq | Sekretaris Jenderal | Dimiyati Natakusuma |
| Bendahara Umum | Hj. Nurhayati | Bendahara Umum | Dyah Anita Prihapsari |
| Sikap Politik | Pendukung Pemerintah | Sikap Politik | Oposisi |

Sumber: Diolah dari berbagai sumber media massa, 2014.

Romahurmuziy mengatakan, berdasarkan keputusan muktamar yang baru saja diselenggarakan di Surabaya bahwa PPP tidak akan menjadi oposisi terhadap pemerintahan Jokowi-JK. Bahkan terdapat kebijakan khusus dalam muktamar tersebut untuk menjadi bagian dari pemerintah. PPP mendukung penuh pemerintahan Jokowi-JK. Walau cuma ada satu kader PPP dalam kabinet, PPP menyatakan siap menyukseskan dan membantu pemerintahan Jokowi-JK. Ia mengatakan, “Berdasarkan Muktamar di Surabaya, PPP bagian dari pemerintah. Itu sudah keputusan tertinggi demi kebaikan partai. Karena itu, kami solid dukung pemerintah”.⁴⁹

Selanjutnya, ketika salah satu kader PPP, Lukman Hakim Saifuddin, diangkat menjadi Menteri Agama, Romahurmuziy berterima kasih atas kepercayaan Jokowi memilih kadernya dan melibatkan partainya pada pemerintahan.⁵⁰

Dalam perkembangan kemudian, konflik internal dengan terbentuknya kepengurusan ganda tersebut, diselenggarakan Muktamar VIII (Muktamar Islah) PPP di Pondok Gede, Jakarta, 8-10 April 2016. Latar belakang dilaksanakan Muktamar ini adalah solusi yang ditawarkan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, dengan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) mengaktifkan lagi PPP hasil Muktamar Bandung 2011 yang sudah habis

masa kepengurusannya. SK tersebut diaktifkan hanya dalam waktu enam bulan demi memberi kesempatan agar kubu Romahurmuziy dan kubu Djan Faridz bersatu dengan menggelar Muktamar Islah. Selanjutnya PPP hasil Muktamar Surabaya dan hasil Muktamar Jakarta bersepakat untuk mengadakan Muktamar, hanya Djan Faridz dan beberapa pengurus hasil Muktamar Jakarta seperti Dimiyati Natakusuma dan Humphrey Djemat yang tak mau mengikuti langkah islah melalui muktamar.⁵¹ Terkait ketidakhadiran Djan Faridz, anggota *Steering Committee* (SC) Muktamar PPP, Arsul Sani, mengatakan, “ketidakhadiran Djan Faridz tak akan mengganggu proses islah yang akan dilakukan. Sebab, sejak awal perselisihan yang terjadi adalah antara Romahurmuziy dengan Suryadharma Ali”.⁵²

Tidak seperti “Kongres Islah” Partai Golkar di Bali, dimana pihak-pihak yang bertikai, Aburizal Bakrie dan Agung, tidak mencalonkan diri sebagai ketua umum, sebaliknya pada Muktamar PPP, salah satu pihak yang bertikai, Romahurmuziy, maju bersaing memperebutkan ketua umum PPP. Selain Romahurmuziy, kader lain yang bersaing dalam muktamar, dari kubu Djan, yaitu Epyardi Asda dan Fernita Darwis. Dalam pemilihan ketua umum tersebut,

⁴⁹ “Romahurmuziy: PPP Dukung Penuh Pemerintahan Jokowi-JK”, diakses 15 Januari 2017, <http://www.beritasatu.com/nasional/220472-romahurmuziy-ppp-dukung-penuh-pemerintahan-jokowijk.html>

⁵⁰ “PPP Bangga Kadernya Dipercaya Masuk Kabinet Kerja Jokowi” 27 Okt 2014, 12:09 WIB, diakses 15 Januari 2017, <http://news.liputan6.com/read/2124980/ppp-bangga-kadernya-dipercaya-masuk-kabinet-kerja-jokowi>

⁵¹ “PPP dan Islah yang Tak Sempurna”, diakses 15 Januari 2017, <http://nasional.kompas.com/read/2016/04/11/06350171/PPP.dan.Islah.yang.Tak.Sempurna>

⁵² “Islah PPP Tak Akan Terganggu Tanpa Kehadiran Djan Faridz,” diakses 15 Januari 2017, http://nasional.kompas.com/read/2016/04/08/20232021/Islah.PPP.Tak.Akan.Terganggu.Tanpa.Kehadiran.Djan.Faridz?utm_source=RD&utm_medium=inart&utm_campaign=khiprd

Romahurmuzy, terpilih sebagai Ketua Umum DPP PPP periode 2016-2021 secara aklamasi.

Pasca terpilih sebagai Ketua Umum PPP, Romahurmuzy, berharap, dengan keputusan yang disepakati oleh mayoritas pemilik suara yang hadir, mencapai 1.235 orang perwakilan DPW dan DPC dari seluruh Indonesia, dapat menjadi titik akhir dari kisruh kepengurusan PPP, yang sudah berjalan selama satu setengah tahun. Selanjutnya ia berjanji tidak akan pernah menutup pintu islah terhadap kubu kepengurusan hasil Muktamar Jakarta, yang berada di bawah kepemimpinan Djan Faridz. Ia juga mengatakan bahwa pihaknya tidak akan me-recall kader-kader PPP yang sebelumnya menyatakan tidak setuju dengan penyelenggaraan Muktamar ini.⁵³

Meski sudah dilaksanakan “Muktamar Islah” dengan terpilihnya Romahurmuzy, dan beberapa pentolan kubu Djan Faridz hadir, seperti Epyardi Asda dan Fernita Darwis, kubu Djan Faridz menilai bahwa kepengurusan PPP hasil muktamar dengan ketua umum PPP terpilih Romahurmuzy tidak sah. Lalu langkah selanjutnya yang dilakukan kubu Djan Faridz melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ternyata Putusan PTUN menyatakan bahwa SK Menkumham Nomor M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016 tentang Pengesahan Susunan Personalia DPP PPP Masa Bakti 2016-2021 dengan ketua umum Romahurmuzy tidak sah dan batal demi hukum. Putusan tersebut menyatakan, “Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-06.AH.11.01 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2016-2021”.

Atas putusan PTUN tersebut, kubu Romahurmuzy mengajukan banding. Sekjern PPP, Arsul Sani, mengatakan kubunya

akan mengajukan banding, demikian juga Menkumham akan banding juga. Ia mengatakan, “Putusan PTUN belum memiliki kekuatan hukum. Nanti akan ada tiga tingkat peradilan lagi, yakni banding, kasasi dan Peninjauan Kembali (PK)”.⁵⁴ Banding yang diajukan kubu Romi ternyata dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN), yang menyatakan PPP yang sah adalah di bawah kepengurusan Ketua Umum Romahurmuzy dengan Sekjen Arsul Sani sesuai dengan SK Kemenkum HAM.⁵⁵

Meski tidak sampai terjadi perpecahan seperti di Golkar dan PPP, konflik internal atau faksionalisme terkait dukungan menjadi partai oposisi atau bergabung dengan pemerintah terjadi pula pada Partai Amanah Nasional (PAN). Pada Pilpres 2014, PAN secara resmi bergabung dengan Koalisi Merah Putih (KMP), yang mengusung pasangan calon Prabowo-Hatta (Hatta Rajasa merupakan Ketua Umum PAN). Namun demikian, ternyata sebagai kader PAN memilih mendukung pasangan Jokowi-JK. Adalah mantan Ketua Umum PAN, Soetrisno Bachir, di antaranya, yang mendukung pasangan calon Jokowi-JK. Bahkan ia menyatakan siap menggelontorkan dana untuk memenangkan pasangan Jokowi-JK. Soetrisno juga masuk dalam tim pengarah kemenangan Jokowi-JK, bersama dengan Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, mantan Ketua PBNU Hasyim Muzadi, Wakil Ketua DPR Pramono Anung, dan Jenderal TNI Purnawirawan Luhut B. Panjaitan.⁵⁶

Sama seperti PPP dan Golkar, dalam perkembangan kemudian, PAN juga bergabung dengan koalisi pemerintahan. Adalah pasca

⁵³ “Romahurmuzy Terpilih Sebagai Ketua Umum PPP Secara Aklamasi,” diakses 15 Januari 2017, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/16/04/09/o5d6w4354-romahurmuzy-terpilih-sebagai-ketua-umum-ppp-secara-aklamasi>

⁵⁴ “PPP Kubu Romi Bakal Ajukan Banding Atas Putusan PTUN,” diakses 15 Januari 2017, <http://news.okezone.com/read/2016/11/22/337/1548519/ppp-kubu-romi-bakal-ajukan-banding-atas-putusan-ptun>

⁵⁵ “Menang Gugatan PPP Kubu Romi Ajak Kader Bersatu,” diakses 20 Juni 2017, <https://news.detik.com/berita/d-3530340/menang-gugatan-ppp-kubu-romi-ajak-kader-bersatu>, 14 Juni 2017.

⁵⁶ “Dukung Jokowi-JK, Soetrisno Bachir Siap Kucurkan Dana,” diakses 15 Januari 2017, <http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/06/04/269582481/Dukung-Jokowi-JK-Soetrisno-Bachir-Siap-Kucurkan-Dana>

terpilihnya Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum.⁵⁷ PAN secara resmi bergabung dengan koalisi pemerintahan. Zulkifli mengatakan, alasan PAN bergabung dengan pemerintah adalah demi menjaga stabilitas politik dan pemerintahan, khususnya di tengah situasi ekonomi dunia yang sedang tidak stabil. Bergabungnya PAN ini didukung juga oleh Amien Rais. Sekretaris Jenderal PAN, Eddy Soeparno mengatakan bahwa Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais sudah menyetujui langkah PAN yang bergabung ke pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.⁵⁸ Terkait dengan dukungan Amien Rais ini, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon menyindir langkah yang diambil oleh Amien Rais tersebut, dengan mengatakan bahwa ia menghargai sikap PAN yang bergabung ke KIH. Baginya, keputusan itu adalah hak politik dari setiap partai politik yang ada. Tetapi “Pak Amien Rais yang selalu mengatakan bahwa KMP adalah benteng keselamatan Indonesia. Amien Rais yang selalu paling depan bicara itu....”, namun PAN keluar dari KMP.⁵⁹

Pasca PAN bergabung dengan koalisi pemerintah, sama seperti partai-partai lainnya yang mendapat jatah menteri, PAN juga mendapat jatah menteri, di mana salah satu kader PAN, yaitu Asman Abnur, diangkat menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB),

⁵⁷ Zulkifli Hasan sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PAN, dengan Ketua Umum PAN, Hatta Rajasa. Pada Kongre IV 28 Februari s/d2 Maret 2015 di Nusa Dua, Bali, keduanya bersaing memperebutkan ketua umum PAN. Dalam pemilihan yang menggunakan mekanisme voting ini, Zulkifli Hasan, terpilih menjadi ketua umum PAN dengan meraup 292 suara, sedang Hatta Rajasa hanya memperoleh 286 suara. Lihat, “Zulkifli Hasan Terpilih Sebagai Ketua Umum PAN,” diakses 15 Januari 2017, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/15/03/01/nkjgh7-zulkifli-hasan-terpilih-sebagai-ketua-umum-pan>

⁵⁸ “Amien Rais Disebut Setuju Langkah PAN Bergabung ke Pemerintah,” diakses 15 Januari 2017, <http://nasional.kompas.com/read/2015/09/02/16004081/Amien.Rais.Disebut.Setuju.Langkah.PAN.Bergabung.ke.Pemerintah>

⁵⁹ “PAN Gabung ke KIH, Fadli Zon Sindir Amien Rais,” diakses 15 Januari 2017, <http://news.okezone.com/read/2015/09/02/337/1207109/pan-gabung-ke-kih-fadli-zon-sindir-amien-rais>

menggantikan Yuddy Chrisnandi (Partai Hanura), yang diberhentikan. Partai Hanura sendiri semula ada dua kadernya yang duduknya di kabinet, tetapi dalam reshuffle jilid 2, yaitu Yudi Chrisnandi (mantan Menpan RB) dan Saleh Husin (mantan Menperin), dicopot oleh Jokowi. Dengan perubahan ini, praktis Partai Hanura hanya mendapatkan satu kursi, yakni Menko Polhukam yang dijabat oleh Ketum Hanura, Wiranto. Selain mendapat kursi menteri, Ketua Majelis Pertimbangan PAN Soetrisno Bachir juga dipercaya memimpin lembaga non-struktural, yaitu Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN).⁶⁰

Dengan bergabungnya PAN dalam pemerintahan, menyusul Golkar sebelumnya, menarik apa yang dikatakan oleh Desmond J Mahesa, kader Gerindra,

“Kekuatan Koalisi Merah Putih selama ini di sokong oleh Golkar dan PAN yang awalnya akan bergabung ke kubu Jokowi-JK, tetapi kemudian mengalihkan dukungan. Artinya, Koalisi Merah Putih sebenarnya hanya pilihan karena ditolak Jokowi-JK. Koalisi Merah Putih hanya dijadikan kendaraan oleh partai-partai tersebut untuk meningkatkan daya tawar mereka sehingga kembali dilirik Jokowi-JK”⁶¹

KESIMPULAN

Memang suatu keniscayaan dalam setiap organisasi, apalagi organisasi yang bernama partai politik, adanya konflik dan/atau faksionalisme. Namun konflik dan/atau faksionalisme itu semestinya tidak bermuara pada perpecahan dan mengganggu soliditas partai. Pada era reformasi ini, kecenderungan yang muncul bahwa partai-partai politik

⁶⁰ “PAN Dapat Posisi, Jokowi Lantik Soetrisno Bachir Jadi Ketua KEIN Hari Ini,” diakses 15 Januari 2017, <http://nasional.kompas.com/read/2016/01/20/06540821/PAN.Dapat.Posisi.Jokowi.Lantik.Soetrisno.Bachir.Jadi.Ketua.KEIN>

⁶¹ Dikutip dari Esty Ekawati, “Koalisi Partai Islam di Indonesia Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014”, *Jurnal Penelitian Politik*, Volume 12 No. 1 (Juni 2015): 26. Lihat juga “Koalisi-Merah-Putih-Hanya-Akan-Tersisa-Gerindra-Dan-PKS,” diakses 15 Januari 2017, <https://www.selasar.com/politik/koalisi-merah-putih-hanya-akan-tersisa-gerindra-dan-pks>

terlibat dalam konflik internal, sebagian memunculkan perpecahan yang berujung pada lahirnya partai-partai baru dan sebagian lagi melahirkan kepengurusan ganda. Kuatnya konflik internal partai-partai politik tersebut memperlihatkan betapa lemahnya soliditas elite di tubuh partai-partai politik. Kerap munculnya konflik internal pada partai-partai politik juga menandakan betapa minimnya pelebagaan di tubuh partai dalam mengatasi konflik untuk menuju konsensus.

Kecenderungan konflik internal pada partai-partai politik era reformasi ini bukan lantaran disebabkan karena perbedaan visi-misi, platform dan ideologi partai, tetapi cenderung disebabkan oleh pragmatisme atas pilihan koalisi partai politik dalam mendukung calon presiden dan wakil presiden dan/atau

Dengan nada yang sama juga dikemukakan juga oleh salah satu kader dari PPP, yang mengatakan,

.....Di era reformasi, konflik di internal PPP sudah berubah. di era reformasi saya melihat ideologi di PPP sudah menurun. Pada era reformasi masyarakat tradisional PPP yang berlatar unsur kemudian menjadi masyarakat murni PPP yang tidak ada kaitannya dengan persoalan ideologi. Sehingga konflik di PPP sekarang bukan konflik aliran, melainkan konflik kepentingan...”⁶³

Seperti terlihat pada tabel di bawah, konflik internal partai-partai cenderung bersifat pragmatis yang disebabkan oleh pilihan koalisi, yang celaknya pilihan koalisi tersebut bukan karena faktor ideologi tetapi untuk memperoleh jabatan politik.

Tabel 7. Latar Belakang Konflik Internal Partai Akibat Pilihan Koalisi

| Partai | Kelompok/Faksi | Faktor Penyebab |
|----------------------|--|--|
| PKB | Gus Dur, Alwi Shihab –Matori Abdul Djilil | Perbedaan dukungan, Matori mendukung SI MPR yang memberhentikan Gus Dur selaku Presiden. |
| Partai Golkar | Akbar Tandjung – Jusuf Kalla, Aburizal Bakrie – Surya Paloh, Aburizal Bakrie-Agung Laksono | -Perbedaan dukungan Pilpres 2004, perebutan ketua umum di Munas 2004, Munas 2009 -Perbedaan dukungan Pilpres 2014, Munas 2014 |
| PPP | Suryadharma Ali, Djan Faridz – Romahurmuziy | Perbedaan dukungan capres 2014 dan dukungan kepada oposisi dan pemerintah |
| PAN | Soetrisno Bachir – Hatta Rajasa Hatta Rajasa-Zulkifli Hasan | Perbedaan dukungan Pilpres 2014 Kongres IV 2015 |

Sumber: Diolah sendiri dari berbagai sumber, 2017.

pemerintahan serta kepentingan kekuasaan. Litbang *Kompas* dalam tulisannya memaparkan, “Ciri utama dari perpecahan parpol umumnya dimulai dengan konflik antarelite terkait dengan sikap mereka terhadap strategi dalam merebut kekuasaan. Pragmatisme politik yang didorong oleh hasrat untuk berkuasa yang tinggi membuat sejumlah elite memisahkan diri dari parpol induk dan mendirikan parpol”.⁶²

Koalisi dan/atau oposisi partai-partai politik dalam pemerintahan adalah suatu yang biasa, bahkan mungkin suatu keniscayaan bilamana suatu pemerintahan hasil pemilihan umum tidak menghasilkan dukungan mayoritas di parlemen atau DPR. Seperti yang dipaparkan oleh Lijphart, partai-partai politik akan melakukan koalisi, apakah berdasarkan kesamaan ideologi atau kedekatan ideologi. Dalam praktek, partai-partai politik melakukan kolisi bukan atas dasar kesamaan ideologi

⁶² Lihat “Pragmatisme di Balik Konflik Internal Parpol”, *Harian Kompas*, 16 November 2015.

⁶³ Mujahid, Kader dan Fungsiaris PP, FGD Tim Penelitian di Surabaya, 12 April 2016.

tetapi lebih disebabkan oleh faktor kepentingan kekuasaan atau pragmatisme politik, sehingga yang terjadi koalisi didorong karena faktor *office seeking*, mencari jabatan dan memaksimalkan kekuasaan.

Berdasarkan pengamatan Ari Dwipayana, model koalisi yang berkembang menunjukkan perilaku partai dalam meracik menu koalisi dipengaruhi oleh dua karakter. Pertama, upaya memburu jabatan (*office seeking*), dimana perilaku partai dalam membangun koalisi lebih didasarkan pada kehendak untuk memperbesar peluang dalam memperoleh posisi di kabinet-pemerintahan yang akan terbentuk. Kedua, modus pencari suara (*vote seeking*), dimana elite partai politik dalam membentuk koalisi lebih didasarkan pada upaya memenangkan pemilihan. Koalisi yang terbentuk dengan dasar *office seeking* dan *vote seeking* pada dasarnya koalisi yang rapuh. Koalisi yang dipraktikkan oleh partai-partai politik kita dewasa ini cenderung bersifat *instant* karena lebih berdasarkan kepentingan politik jangka pendek dan belum berdasarkan *platform* dan program politik yang disepakati bersama.⁶⁴

Argumentasi seperti ini bisa jadi dapat menjelaskan konflik internal yang terjadi pada partai-partai politik era reformasi ini, dimana akibat pilihan koalisi dari para kader dan pengurus partai menyebabkan partai terbelah: pendukung pemerintah atau oposisi. Bila mengacu kepada pandangan yang dikemukakan oleh Duverger dan Weber, faksionalisme dan konflik internal partai politik terjadi karena adanya perbedaan kepentingan yang disebabkan oleh motif-motif ekonomi dan kepentingan pragmatisme, bukan didasarkan pada sikap *altruisme* dan *calling* ketika mereka terjun ke wilayah politik sehingga muncul faksi-faksi dan konflik internal di partai-partai politik.

Bila faksionalisme dan konflik internal partai politik disebabkan oleh perbedaan ideologi masih bisa difahami karena di dalamnya ada unsur idealisme dan prinsip hidup yang

harus dipertahankan/diperjuangkan untuk mewujudkan cita-cita yang hendak diwujudkan dalam berbagai kebijakan dan program, baik dalam partai maupun dalam pemerintahan. Namun jika yang diperjuangkan karena faktor atau motif ekonomi dan kekuasaan *an sich*, faksionalisme dan konflik internal partai sungguh sangat memprihatinkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Amalia, Luky Sandra (ed.), *Evaluasi Pemilihan Presiden Langsung di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Azwar, Rully Chairil, *Politik Komunikasi Partai Golkar di Tiga Era*, Jakarta: Grasindo, 2009.
- Durverger, Maurice, *Sosiologi Politik*, Jakarta: Rajawali Pers, 1981.
- Effendy, Bahtiar, dkk, *Beringin Membangun, Sejarah Politik Partai Golkar*, Jakarta; Grafindo Khasanah Ilmu, 2012.
- Ekawati, Esty, "Koalisi Partai Islam di Indonesia Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014", *Jurnal Penelitian Politik*, Volume 12 No. 1 (Juni 2015)
- Feith, Herbert, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, Ithaca and London; Cornell University Press, 1973.
- Haris, Syamsuddin, *Konflik Presiden-DPR dan Dilema Transisi Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: Grafiti Pers, 2007.
- Hine, David, "Factionalism in West European Parties: A Framework for Analysis," dalam *West European Politics*, Vol. 5, No. 1 (2013).
- Kamarudin, "Konflik Internal Partai Kebangkitan Bangsa (Studi Kasus Tahun 2004-2007)", Disertasi, Program Pascasarjana Ilmu Politik FISIP UI, 2007.

⁶⁴ AA GN Ari Dwipayana, "Multi Partai, Presidensialisme dan Efektivitas Pemerintahan," diakses 15 Januari 2017, , http://pshk.law.uui.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=105&Itemid=

- Lijphart, Arend, *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*, Yale University Press, 1999.
- Litbang Kompas, *Partai Politik Indonesia 1999-2019, Konsentrasi dan Dekonsentrasi Kuasa*, Jakarta; Penerbit Kompas, 2016.
- McAllister, Ian, "Party Adaptation and Factionalism in within the Australian Party System", dalam *American Journal of Political Science*, Vol. 35, No. 1 (Februari 1991).
- Nainggolan, Bestian, "Konsentrasi dan Dekonsentrasi Kuasa", dalam Litbang Kompas, *Partai Politik Indonesia 1999-2019, Konsentrasi dan Dekonsentrasi Kuasa*, Jakarta: Penerbit Kompas, 2016.
- Noor, Firman, *Perpecahan dan Soloditas Partai Islam di Indonesia: Kasus PKB dan PKS Dekade Awal Reformasi*, Jakarta: LIPI Pers, 2015.
- Rauf, Maswadi, *Konsensus dan Konflik Politik: Sebuah Penjajagan Teoritis*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2000.
- Romli, Lili, "Peta Kekuatan Politik dan Kecenderungan Koalisi", dalam Moch. Nurhasim dan Ikrar Nusa Bhakti (ed.), *Sistem Presidensial dan Sosok Presiden Ideal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Romli, Lili, "Peta Kekuatan Partai Politik Hasil Pemilu 2014", Luky Sandra Amalia (Ed.), *Evaluasi Pemilu Legislatif 2014: Analisis Proses dan Hasil*, Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2016.
- Sinulingga, Andi Harianto, *Pecah Belah Partai Golkar: Dinamika Konflik Golkar Pasca Orde Baru*, Jakarta: Penjuru Ilmu, 2005.
- Tandjung, Akbar, *The Golkar Way: Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Reformasi*, Jakarta: Gramedia.
- Wardani, Sri Budi Eko, "Koalisi Partai Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung: Kasus Pilkada Provinsi Banten Tahun 2006", *Tesis*, Jakarta: Program Pascasarjana Ilmu Politik FISIP UI, 2007.
- Zariski, Raphael, "Party Factions and Comparative Politics: Some Preliminary Observations," dalam *Midwest Journal of Political Science*, Vol. 4, No. 1 (1960).

Website

AA GN Ari Dwipayana, "Multi Partai, Presidensialisme dan Efektivitas Pemerintahan," diakses 15 Januari 2017, http://pshk.law.uui.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=105&Itemid=

"Merunut Sejarah Konflik Partai Golkar," diakses 15 Januari 2017, <http://print.kompas.com/baca/opini/duduk-perkara/2016/01/13/Merunut-Sejarah-Konflik-Partai-Golkar>

"Golkar Pecat Pengurus dan Kader "Mbalela"", diakses 15 Januari 2017, <http://www.suaramerdeka.com/harian/0409/16/nas04.htm>

"Fahmi Idris Mesin Golkar Tak Bergerak Dukung JK Saya Syok," diakses 15 Januari 2017, <https://m.tempo.co/read/news/2009/07/20/149188094/fahmi-idris-mesin-golkar-tak-bergerak-dukung-jk-saya-syok>

"Munas Golkar Pekanbaru Perang Akbar VS JK Jilid II," diakses 15 Januari 2017, <http://news.detik.com/berita/1216118/munas-golkar-pekanbaru-perang-akbar-vs-jk-jilid-ii>

"Golkar Secara Bulat Masuk Koalisi SBY," diakses 15 Januari 2017, <http://nasional.kompas.com/read/2009/10/15/22215830/golkar.secara.bulat.masuk.koalisi.sby>

"Golkar Resmi Masuk Koalisi Yudhoyono," diakses 15 Januari 2017, <http://nasional.tempo.co/read/news/2009/10/14/078202673/golkar-resmi-masuk-koalisi-yudhoyono>

"Tokoh Senior Golkar Dukung Jokowi-JK," diakses 15 Januari 2017, <http://www.beritasatu.tv/news/tokoh-senior-golkar-dukung-jokowi-jk/>

- “Setya Novanto Terpilih Jadi Ketua Umum Partai Golkar,” diakses 15 Januari 2017, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/16/05/17/o7aopj377-setyanovanto-terpilih-jadi-ketua-umum-partai-golkar>
- “Konflik PPP Koalisi,” diakses 15 Januari 2017, http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/04/140419_konflik_ppp_koalisi
- “Dukung Jokowi Jadi Capres, PPP Siapkan Koalisi Buah Semangka,” diakses 15 Januari 2017, <http://nasional.kompas.com/read/2014/03/16/1308302/Dukung.Jokowi.Jadi.Capres.PPP.Siapkan.Koalisi.Buah.Semangka>
- “Koalisi Partai Islam,” diakses 15 Januari 2017, http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/04/140418_koalisi_partai_islam
- Hamzah Haz Minta Kader PPP Dukung Jokowi-JK,” diakses 15 Januari 2017, <http://lintas7.com/hamzah-haz-minta-kader-ppp-dukung-jokowi-jk/>
- “PPP, Kader Dan Pengurus Pendukung Jokowi-JK Silakan Mundur,” diakses 15 Januari 2017, <http://www.republika.co.id/berita/pemilu/hot-politic/14/07/30/n9izue-ppp-kader-dan-pengurus-pendukung-jokowijk-silakan-mundur>
- Romahurmuzy, PPP Dukung Penuh Pemerintahan Jokowi-JK,” diakses 15 Januari 2017, <http://www.beritasatu.com/nasional/220472-romahurmuzy-ppp-dukung-penuh-pemerintahan-jokowijk.html>
- “PPP Bangga Kadernya Dipercaya Masuk Kabinet Kerja Jokowi,” diakses 15 Januari 2017, <http://news.liputan6.com/read/2124980/ppp-bangga-kadernya-dipercaya-masuk-kabinet-kerja-jokowi>
- “PPP Dan Islah Yang Tak Sempurna,” diakses 15 Januari 2017, <http://nasional.kompas.com/read/2016/04/11/06350171/PPP.dan.Islah.yang.Tak.Sempurna>
- “Islah PPP Tak Akan Terganggu Tanpa Kehadiran Djan Faridz,” diakses 15 Januari 2017, http://nasional.kompas.com/read/2016/04/08/20232021/Islah.PPP.Tak.Akan.Terganggu.Tanpa.Kehadiran.Djan.Faridz?utm_source=RD&utm_medium=inart&utm_campaign=khiprd
- “Romahurmuzy Terpilih Sebagai Ketua Umum PPP Secara Aklamasi,” diakses 15 Januari 2017, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/16/04/09/o5d6w4354-romahurmuzy-terpilih-sebagai-ketua-umum-ppp-secara-aklamasi>
- “Menang Di PTUN PPP Djan Faridz Kembali Klaim Sebagai Kepengurusan Yang Sah,” diakses 15 Januari 2017, <http://nasional.kompas.com/read/2016/11/22/16443381/menang.di.ptun.ppp.djan.faridz.kembali.klaim.sebagai.kepengurusan.yang.sah>
- “PPP Kubu Romi Bakal Ajukan Banding Atas Putusan PTUN,” diakses 15 Januari 2017, <http://news.okezone.com/read/2016/11/22/337/1548519/ppp-kubu-romi-bakal-ajukan-banding-atas-putusan-ptun>
- “Menang Gugatan PPP Kubu Romi Ajak Kader Bersatu,” 14 Juni 2017, diakses 20 Juni 2017, <https://news.detik.com/berita/d-3530340/menang-gugatan-ppp-kubu-romi-ajak-kader-bersatu>
- “Dukung Jokowi-JK, Soetrisno Bachir Siap Kucurkan Dana,” diakses 15 Januari 2017, <http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/06/04/269582481/Dukung-Jokowi-JK-Soetrisno-Bachir-Siap-Kucurkan-Dana>
- “Zulkifli Hasan Terpilih Sebagai Ketua Umum PAN,” diakses 15 Januari 2017, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/15/03/01/nkjgh7-zulkifli-hasan-terpilih-sebagai-ketua-umum-pan>

“Amien Rais Disebut Setuju Langkah PAN Bergabung ke Pemerintah,” diakses 15 Januari 2017, <http://nasional.kompas.com/read/2015/09/02/16004081/Amien.Rais.Disebut.Setuju.Langkah.PAN.Bergabung.ke.Pemerintah>

“PAN Dapat Posisi Jokowi Lantik Soetrisno Bachir Jadi Ketua KEIN,” diakses 15 Januari 2017, <http://nasional.kompas.com/read/2016/01/20/06540821/PAN.Dapat.Posisi.Jokowi.Lantik.Soetrisno.Bachir.Jadi.Ketua.KEIN>.

“Koalisi Merah Putih Hanya Akan Tersisa Gerindra Dan PKS,” diakses 15 Januari 2017, <https://www.selasar.com/politik/koalisi-merah-putih-hanya-akan-tersisa-gerindra-dan-pks>